ISSN : 1979-6579

Buletin Ketenagalistrikan

Edisi 43 Volume 11 September 2015

Memahami Tagihan Listrik Prabayar

PLTSa Bantar Gebang, Mengubah Sampah Menjadi Listrik

Menteri ESDM: 35.000 MW Jalan Terus!

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

mendukung Zona Integritas
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
serta
Wilayah Bebas dari Korupsi

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
Jalan HR Rasuna Said Blok X2, Kav.7-8, Kuningan
Jakarta Selatan 12950
Telp. (021) 5225180, Fax (021) 5256044
www.djk.esdm.go.id

Buletin Ketenagalistrikan
Edisi 43 Volume XIII |
SEPTEMBER 2015

SUSUNAN REDAKSI
Penanggung Jawab
Sekretaris Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan

Redaktur
Totoh Abdul Fatah
Wiwid Mulyadi
Heru Setiawan
Ear Marison
Hagni Surendro
Sudarti
Jackson Frans
Fathorrahman
Hari Dwi Wijayanto
Pandu Satria Jati B
Anggita Miftah Hairani
David F Silalahi
Ahmad Amiruddin
Novan Akhiriyanto
Dina Andriani
Hening Surya Bayu A.
Fanny Ristantono
M. Tomas Trianantа

Penyunting/ Editor
Ernawaty
Suwarno
Matilda Prameswari
Stefanus Wisnu W

Desain Grafis/Fotografer
Achmad Yusuf Haryono
Agus Supriyadi
Ajat Munajat
Novi Pravitasari
Adar

Sekretariat
Emi Tursilah
Irman Suryana
Anida Sabilawati
Rizka Octiwi
Riono Saputra

Alamat Redaksi
Redaksi Buletin Ketenagalistrikan
Jalan HR Rasuna Said Blok X2,
Kav.7-8, Kuningan
Jakarta Selatan 12950

www.djk.esdm.go.id

Dari Redaksi

Pembaca yang budiman,

Tahun ini kita merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-70 kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun ini pula Kementerian ESDM memperingati Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-70. Melalui dua momentum ini, Kementerian ESDM memperkenalkan tujuan besar yang ingin dicapai, yakni membangun kedaulatan energi untuk kemakmuran rakyat. Kedaulatan energi ini tercipta melalui empat hal yang kini menjadi fokus Kementerian ESDM, yaitu eksplorasi, produksi, diversifikasi, dan konservasi.

Di bidang ketenagalistrikan, Proyek Pembangkit Listrik 35.000 MW menjadi hal yang mutlak dilakukan untuk mendukung terciptanya kedaulatan energi bangsa ini. Beberapa bulan terakhir ada berbagai pendapat yang dikemukakan mengenai program tersebut. Keraguan akan terlaksananya program ini juga sempat disuarakan dan menjadi *trending topic* di berbagai media. Akan tetapi, Menteri ESDM Sudirman Said meyakinkan bahwa Proyek Pembangkit Listrik 35.000 MW harus jalan terus. Terlebih, Presiden Joko Widodo juga tetap berkomitmen dengan program ini. Topik mengenai hal ini kami ulas di Tajuk Utama.

Rangkaian peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-70 kami sajikan dalam Liputan Khusus. Peringatan tahun ini tidak hanya berupa kegiatan seremonial saja, namun juga pemaparan capaian dan terobosan yang telah dilakukan di sektor ESDM. Dalam peringatan ini pula, Kementerian ESDM menjawab tantangan di sektor ESDM melalui 9 Program Strategis Nasional.

Dalam Galeri, kami menghadirkan foto-foto keceriaan pegawai Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam menyambut HUT ke-70 Republik Indonesia. Kami juga mengulas *sharing* dari CEO General Electric Indonesia Handry Satriago dalam rubrik Inspirasi saat ia memberikan 'kuliah' di *One-Hour University* yang digagas oleh Kementerian ESDM.

Semoga Pembaca terinspirasi!

Salam Redaksi

DAFTAR ISI

27 **Pemerintah Terus Dorong Panas Bumi untuk Pembangkit Listrik**

Dari Redaksi

Tajuk Utama

6 Menteri ESDM: 35.000 MW Jalan Terus!

Liputan Khusus

Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-70

8 Menteri ESDM Pimpin Upacara Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-70
10 Terobosan-terobosan di Subsektor Ketenagalistrikan
11 ESDM Menjawab Tantang melalui 9 Program Strategis Nasional

Warta Kita

12 Menteri ESDM Jelaskan Paket Kebijakan Sektor ESDM
13 PLTP Kamojang Unit 5 Diresmikan
14 Program Strategis Nasional Tanggung Jawab Bersama
17 Ranking *Getting Electricity* Indonesia Membaik
18 Dirjen Ketenagalistrikan Terapkan Sistem Informasi Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
19 Ditjen Ketenagalistrikan Sosialisasikan Aturan tentang SUTT, SUTET dan SUTTAS
20 Dorong Pembangkit Batubara, Pemerintah Lakukan Relaksasi Regulasi
21 Presiden Resmikan Dimulainya Pembangunan PLTU Batang
22 Komposisi EBT Tahun 2025 Ditargetkan 23%
23 Registrasi SLO Online Raih Juara II Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

15 **ITB Dukung Program 35.000 MW**

26 Pemerintah Tingkatkan Kualitas SDM untuk Energi Nuklir

28 Dirjen Tetapkan Komite Manajemen Aturan Jaringan Sulawesi

29 Ketelatenan dan Akurasi Data Kunci Pengendalian *Losses*

30 Dirjen Ketenagalistrikan Tegaskan Pentingnya Pengendalian *Losses*

31 Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan di Kalimantan Dipercepat

32 Percepat Pembangunan Ketenagalistrikan, PTSP di Daerah Perlu Dioptimalkan

40 PLTSa Bantar Gebang, Mengubah Sampah Menjadi Listrik

43 Menteri ESDM Lantik Pejabat Administrator dan Pengawas

44 Birokrasi Harus Punya Jiwa

45 Birokrasi Harus Cepat Tanpa Meninggalkan *Good Governance*

47 Pemotongan Hewan Qurban Kementerian ESDM

53 Gubernur Papua Barat Membuka Roadshow Pameran dan Seminar Hari Nusantara Ke-15

54 Menteri ESDM Hadiri Halal bi Halal di DJK

56 Pemberian Hadiah Lomba Foto HUT ke-70 RI di DJK

Resensi Buku

33 Etika Lingkungan Hidup

Galeri

36 Keceriaan DJK Sambut HUT ke-70 RI

Kolom

38 Memahami Tagihan Listrik Prabayar oleh Ahmad Amiruddin

Pojok Peraturan

42 Daftar Legislasi & Regulasi Terbaru Koleksi Perpustakaan DJK Bulan Januari - September 2015

Tips

48 Berburu Beasiswa Belanda

Inspirasi

50 CEO GE Indonesian: "Hidup itu seperti mendorong mobil di tanjakan"

Program 35.000 MW Butuh Dukungan Pemda

Pemerintah Tawarkan Kemudahan Investasi Listrik di World Expo 2015

Ditjen Ketenagalistrikan Menggelar Upacara HUT ke-70 Indonesia

Meriahnya Buka Puasa Bersama Ditjen Ketenagalistrikan, EBTKE, dan Minerba

Menteri ESDM: 35.000 MW Jalan Terus!

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menegaskan bahwa proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW) tidak akan direvisi. Kementerian ESDM akan terus berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait untuk memastikan target pembangunan pembangkit yang akan selesai di tahun 2019 ini. Bahkan Sudirman menyampaikan bahwa Presiden Jokowi sudah menagih kemungkinan untuk menambah lagi 35 ribu MW yang kedua.

Hal tersebut disampaikan Menteri ESDM saat Pertemuan Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan 35.000 MW di Hotel Dharmawangsa Jakarta, Rabu (9/9). Pertemuan ini dihadiri juga oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir, Kepala Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional (UP3KN), Sekretaris Ditjen Ketenagalistrikan Sujatmiko, dan para pengusaha *Independent Power Producers* (IPP).

Menurut Sudirman, sektor ESDM adalah hulu yg mentukan hilir dari kegiatan ekonomi. Kondisi bangsa Indonesia yang sedang membangun membutuhkan pasokan listrik yg besar. Menurutnya angka 35.000 bukan tiba-tiba muncul tapi telah dihitung dengan cermat. Ada berbagai perhitungan yang digunakan sehingga ditemukan bahwa kebutuhan listrik Indonesia selama lima tahun ke depan adalah 35.000 MW, seperti perhitungan berapa kebutuhan PT PLN (Persero), pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan penduduk. Program 35.000 MW sendiri tertuang dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM No. 0074 K/21/MEM/2015. Menurutnya selama keputusan tersebut belum berubah maka program 35.000 MW yang tertuang dalam RUPTL harus tetap dijalankan.

Penegasan untuk terus komitmen pada program 35.000 MW juga

Menteri ESDM Sudirman Said (ketiga dari kiri) tetap berkomitmen untuk meneruskan Program 35.000 MW.

disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Ia mengatakan bahwa pemerintah saat ini serius menangani hambatan pengadaan pembangkit listrik 35.000 MW agar investor dapat segera memulai pembangunan proyek.

"Sekarang semua jajaran pemerintahan bergerak untuk membantu pembangunan agar tidak ada hambatan di lapangan dalam menjalankan proyek listrik, sehingga hal-hal yang dulu menyulitkan investor dapat dipangkas," tuturnya.

Sudirman juga menyampaikan bahwa kondisi kelistrikan Indonsia masih tertinggal dari negara-negara lain. "Di Brasil, kapasitas terpasang pembangkit listrik sebesar 110 ribu MW (megawatt), dan itu dua kali dari kita. Konsumsi listrik per kapitanya 2.500 kWh (Kilo Watt Hours), empat kali dari kita," ungkapnya.

Padahal jumlah penduduk yang dimiliki Indonesia hampir sama dengan jumlah penduduk yang dimiliki Brasil. Rasio elektrifikasi Indonesia juga masih tertinggal dari negara-negara tetangga. Singapura memiliki rasio elektrifikasi sebesar 100 %, Brunei Darussalam 99,7 %, Thailand 99,3 %, Malaysia 99 %, dan Vietnam 98 %.

Untuk itu Menteri ESDM mengajak semua pihak berkomitmen mensukseskan program ini sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pertemuan koordinasi seperti ini akan terus dilakukan secara periodik, di samping juga dilakukan pembahasan dengan instansi terkait secara terus menerus. (PSJ)

- ***Atas**-Sekretaris Jenderal ESDM Teguh Pamuji menyampaikan sambutannya.*
- ***Tengah**-Koordinasi dengan IPP akan terus dilakukan secara periodik.*
- ***Bawah**-Dirut PLN Sofyan Basir memaparkan program 35.000 MW yang menjadi bagian dari PT PLN (Persero).*

Menteri ESDM Pimpin Upacara Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-70

Menteri ESDM Sudirman Said pimpin upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-70 Pertambangan dan Energi di Plaza Kementerian ESDM pagi ini (28/9). Hadir dalam acara tersebut mantan menteri Ginandjar Kartasasmita dan Darwin Zahedy Saleh, pejabat eselon di lingkungan ESDM termasuk Dirjen Ketenagalistrikan Jarman dan Sesditjen Ketenagalistrikan Sujatmiko, dan para *stakeholder* terkait.

Mengawali sambutannya, Sudirman mengucapkan terimakasih pada Menteri ESDM periode 2000-2009 Purnomo Yusgiantoro yang telah mengusulkan tanggal 28 September sebagai Hari Pertambangan. Dengan demikian, tanggal tersebut bisa dijadikan tonggak yang diperingati dari tahun ke tahun.

Sudirman kemudian mengulas perjuangan Arie Lasut, seorang pahlawan kemerdekaan nasional di bidang pertambangan. Karena keteguhan sikap dan pendiriannya, Arie Lasut gugur ditembak oleh pasukan pendudukan Belanda pada 7 Mei 1949. Sudirman menceritakan bahwa Sabtu (26/9) yang lalu, ia dan sejumlah pimpinan di ESDM berziarah ke makam Arie Lasut di Yogyakarta. Di Hari Pertambangan dan Energi ini, Sudirman ingin mengenang perjuangan pahlawan Arie Lasut dan pemuda-pemudi yang gugur untuk dijadikan sebagai teladan.

"Arie Lasut adalah seorang Geolog profesional, seorang pembelajar yang dari waktu ke waktu prestasinya sangat membanggakan. Ketika pemerintah berpindah dari Jepang kepada Belanda, sebetulnya beliau bisa memilih hidup tenang dengan berkolaborasi dengan pemerintah pendudukan; karena sepanjang 1945 sampai 1949 yang datang pada beliau bukan saja tekanan dan teror, tetapi juga rayuan dan godaan untuk bergabung dengan pemerintah pendudukan Belanda. Namun Arie Lasut memilih jalan lurus, jalan membela bangsanya," tutur Sudirman.

Tantangan pejuang bangsa pada masa itu tentu beda dengan tantangan pada masa ini, meskipun memiliki semangat yang sama, yakni semangat rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Sudirman mengakui tantangan yang dihadapi di sektor ESDM nyata di depan mata. Namun demikian, Sudirman memaparkan bahwa dalam setahun terakhir ini Tim ESDM telah bekerja keras untuk mulai menata kembali hal-hal yang pada tahun-tahun sebelumnya tidak tersentuh dengan serius.

"Saya memilih pendekatan penataan institusional; pendekatan penataan kelembagaan," ujar Sudirman. Ia melanjutkan, "Intinya adalah menata para pemimpin, menata *people*, menata regulasi, menata cara kerja, dan menata budaya."

Sudirman mencontohkan bahwa baju seragam ESDM yang baru diberlakukan beberapa bulan terakhir ini merupakan bentuk kelembagaan terhadap korps. Meskipun belum sempurna, Sudirman bertekad bahwa hal tersebut harus dimulai.

Usaha-usaha memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan kepemimpinan organisasi ESDM telah dimulai sejak awal tahun 2015. "ESDM telah melakukan penyegaran pada 503 posisi, yakni 141 mendapatkan promosi, 302 dirotasi, dan demosi pada 60 orang," ungkap Sudirman.

Menurut Sudirman, demosi adalah simbol dari *performance management*. "Jika kita tidak mengambil reaksi pada orang yang bermasalah, maka orang yang berprestasi akan merasa kurang dihargai," ujar Sudirman.

ESDM juga telah melakukan pembekalan bela negara pada PNS baru dan CPNS untuk mengembalikan semangat juang. Sudirman menambahkan, pejabat eselon I dan II di lingkungan ESDM pun masuk kamp militer untuk mengingat kembali ruh serta perjuangan para pendiri bangsa. Selain itu, ESDM telah merumuskan tata nilai yang terdiri dari jujur, profesional, melayani, inovatif, dan berarti.

"Dalam keadaan sulit, yang bekerja adalah idealisme. Saya dan Tim ESDM bertekad mengembalikan idealisme ke dalam institusi ini. Kita cari sumber pengetahuan terbaik, pikiran-pikiran terbaik untuk menata sektor ini," pungkas Sudirman.

Dalam upacara HUT ke-70 Pertambangan dan Energi, disampaikan pula penghargaan Satya Lencana, pengumuman pemenang lomba-lomba dan bantuan umroh untuk pegawai ESDM, serta penampilan marching band dari STEM AKAMIGAS Cepu. (AMH)

Menteri ESDM Sudirman Said pimpin upacara HUT Pertambangan dan Energi ke-70.

- ***Atas kiri-****Adar dari Bagian Rencana dan Laporan DJK menerima bantuan umroh Kementerian ESDM.*
- ***Bawah kiri-****Ibu-ibu anggota Dharma Wanita Persatuan mengikuti upacara HUT Pertambangan dan Energi ke-70.*
- ***Atas kanan-****Stakeholder yang diundang berasal dari unsur pemerintah dan swasta.*
- ***Bawah kanan-****Atraksi dari marching band STEM AKAMIGAS Cepu*

Terobosan-terobosan di Subsektor Ketenagalistrikan

Dirjen Ketenagalistrikan Jarman (paling kiri) menyampaikan capaian dan terobosan di bidang ketenagalistrikan.

Dalam konferensi pers di sela-sela peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi pada Senin (28/9), Menteri ESDM Sudirman Said memberikan kesempatan pada para pimpinan di unit-unit eselon I ESDM untuk menyampaikan capaian dan rencana kerja di unitnya masing-masing. Dirjen Ketenagalistrikan Jarman menyampaikan terobosan-terobosan di subsektor ketenagalistrikan yang salah satunya adalah relaksasi peraturan.

"Kalau situasi yang dulu memerlukan persetujuan Menteri, sekarang tidak perlu lagi selama itu mengacu pada Permen yang ada," ungkap Jarman.

Ia kemudian menjelaskan tentang dua peraturan yang dikeluarkan awal tahun ini yakni Permen 01/2015 dan Permen 03/2015. Dalam Permen 1/2015 diatur bahwa antar wilayah usaha dapat melakukan transaksi listrik tanpa perlu persetujuan lagi kepada Menteri asalkan harganya sesuai dengan harga patokan. Sementara itu, Permen 3/2015 mengatur tentang prosedur pembelian tenaga listrik dan harga patokan pembelian tenaga listrik melalui pemilihan langsung dan penunjukan langsung. Dari sisi perizinan, Jarman menyampaikan bahwa perizinan ketenagalistrikan sudah dilimpahkan kepada BKPM.

"Sampai 23 September 2015, untuk realisasi investasi bidang ketenagalistrikan, sudah ada 88 perusahaan penanaman modal asing (PMA) dengan kapasitas yang mereka usulkan sebesar 40 GW dan dengan investasi sebesar USD31,63 milyar. Sedangkan untuk PMDN ada 66 perusahaan dengan rencana investasi 126 triliun," papar Jarman.

Jarman menyampaikan dengan keluarnya Permen 01/2015 dan Permen 03/2015, gairah investasi di bidang ketenagalistrikan cukup besar. Dengan adanya relaksasi peraturan ini, Jarman mengharapkan investasi di sektor ketenagalistrikan bisa lebih besar lagi.

Ia juga menegaskan untuk mengutamakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) termasuk penggunaan tenaga kerja dalam negeri.

"Bulan kemarin kita sudah meluncurkan suatu database untuk kompetensi ketenagalistrikan. Artinya, semua diregister secara online. Jadi semua pihak baik masyarakat maupun institusi bisa melihat mana-mana tenaga kerja yang boleh masuk, mana-mana yang sudah ada di dalam negeri. Kalaupun ada tenaga asing masuk, ia harus mengikuti aturan kompetensi yang ada dalam negeri," ujar Jarman.

Jarman juga menjelaskan tentang sistem Sertifikat Laik Operasi (SLO) online yang dapat memperbaiki tingkat *easy to getting electricity* yang dimonitor oleh World Bank. Jika dulu dibutuhkan 112 hari untuk mendapatkan listrik, sekarang dipangkas menjadi hanya 60 hari. SLO online ini menjadi salah satu pemenang dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan ESDM.

Jarman juga menyinggung komitmen pemerintah untuk program 35.000 MW. Ia bertekad program ini harus diselesaikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan rasio elektrifikasi. (AMH)

ESDM Menjawab Tantangan melalui 9 Program Strategis Nasional

Menteri ESDM Sudirman Said (tengah) memaparkan 9 Program Strategis Nasional untuk menjawab tantangan sektor ESDM.

Tantangan yang dihadapi di sektor ESDM nyata ada di depan mata. Demikian disampaikan oleh Menteri ESDM Sudirman Said saat memimpin upacara Hari Jadi Pertambangan dan Energi di Jakarta (28/9). Tantangan itu terurai dari produksi minyak yang terus menurun hingga pemanfaatan energi baru terbarukan yang belum tergarap maksimal.

"Kenyataanya, sampai sekarang, melihat cadangan energi berbahan fosil sudah akan habis, gereget atau kemauan menemukan energi baru dan terbarukan belum kelihatan. Saya, kok, takut kita sudah di ambang pintu krisis energi kalau tidak segera diambil tindakan-tindakan," Sudirman mengutip pernyataan dari mantan Menteri Pertambangan dan Energi Prof. Subroto yang pernah dimuat dalam salah satu harian terkemuka di awal tahun ini.

Selain urgensi untuk mengembangkan energi baru terbarukan, tantangan juga muncul dari sisi ketenagalistrikan. Salah satu tantangan yang mesti dihadapi adalah bagaimana meningkatkan rasio elektrifikasi dari 84% menjadi 97% dalam waktu lima tahun ke depan.

Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, ESDM telah menyusun 9 Program Strategis Nasional untuk mempercepat upaya pembangunan kedaulatan energi. Sembilan program tersebut adalah sebagai berikut: perbaikan bauran energi, pembudayaan konservasi energi, eksplorasi migas secara agresif, peningkatan produksi dan lifting migas, pembangunan infrastruktur migas, pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW, pembangunan industri penunjang sektor energi, hilirisasi industri mineral dan batubara, serta konsolidasi industri tambang.

Terkait program 35.000 MW, Sudirman menegaskan perlunya pembangunan pembangkit listrik sebesar 7.000 MW per tahun untuk menunjang pembangunan ekonomi sebesar 6% per tahun. Pemerintah menyadari ini bukanlah hal yang mudah, oleh karena itu dibutuhkan dukungan dari semua pemangku kepentingan dan masyarakat.

Sembilan agenda strategis nasional tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019). Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional, dalam RPJMN 2015-2019 ESDM ditugaskan untuk mencapai beberapa target, antara lain peningkatan lifting minyak dan gas bumi, peningkatan rasio elektrifikasi, konversi BBM ke BBG, dan lain-lain. (AMH)

9 Program Strategis Nasional ini dilaksanakan untuk mempercepat kedaulatan energi.

Paket kebijakan sektor ESDM dikeluarkan untuk dorong pertumbuhan ekonomi.

Menteri ESDM Jelaskan Paket Kebijakan Sektor ESDM

Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyampaikan kebijakan sektor ESDM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (10/9). Sudirman menjelaskan bahwa arah paket kebijakan ESDM adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menjamin kepastian hukum, memudahkan investasi, menggerakkan sektor rill dan memperkuat industri hilir. Dalam konferensi persnya di Gedung DJK Sudirman didampingi oleh Sekretaris Jenderal ESDM Teguh Pamuji, Dirjen Migas Wiratmaja, Dirjen EBTKE Rida Mulyana, dan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi. Dirjen Ketenagalistrikan dan Dirjen Minerba tidak dapat hadir karena keduanya tengah dinas di luar kota.

Sudirman memaparkan berbagai peraturan yang sudah dilaksanakan oleh ESDM dalam sembilan bulan terakhir guna mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi sektor ESDM. Khusus subsektor ketenagalistrikan, Menteri ESDM telah mengeluarkan Permen ESDM Nomor 1/2015 dan Permen ESDM Nomor 3/2015.

"Permen ESDM Nomor 1/2015 dan Permen ESDM Nomor 3/2015 dibuat untuk mempercepat pembangunan kelistrikan di level menteri. Nantinya regulasinya akan ditingkatkan ke level presiden," ujar Sudirman.

Menteri ESDM juga telah mengeluarkan tiga peraturan menteri terkait pendelegasian wewenang pemberian izin di bidang ketenagalistrikan (Permen ESDM Nomor 35/2014), bidang migas (Permen ESDM Nomor 23/2015), dan bidang minerba (Permen ESDM Nomor 25/2015) ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

"Kita bekerja keras memangkas perizinan sampai 60% dalam 6 bulan. ESDM termasuk kementerian yang paling cepat melimpahkan perizinan ke PTSP. Saya menyambut baik karena begitu prosedur perizinan diambil dari wilayahnya, maka akan lebih mudah disederhanakan," tutur Sudirman.

Pada tahun 2014, ESDM memegang 218 perizinan. Namun sejak awal 2015, jumlah ini menyusut menjadi 89 perizinan dimana 63 di antaranya telah didelegasikan ke PTSP di BKPM. Dengan demikian, saat ini ESDM hanya memegang 26 perizinan. Sudirman yakin jumlah tersebut masih bisa disusutkan lagi.

Sudirman kemudian menjelaskan paket kebijakan ESDM pada September atau Oktober tahun ini. ESDM saat ini memiliki 7 rancangan peraturan presiden, 1 rancangan peraturan pemerintah (tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan minerba), dan 1 peraturan menteri (tentang pemanfaatan BBN). Dari tujuh rancangan peraturan presiden, salah satunya terkait dengan program 35.000 MW.

"Ada banyak item yang memerlukan regulasi yang lebih tinggi. Perpres-nya sudah kami siapkan, sudah final juga. Tinggal menunggu *approval* dari Presiden," ungkapnya. Rancangan peraturan presiden yang lainnya yang akan dikeluarkan terkait dengan pembangunan kilang minyak, tata kelola gas bumi, kebijakan harga gas bumi, LPG untuk nelayan, konversi BBM ke BBG untuk transportasi darat, dan krisis energi dan/atau darurat energi. (AMH)

PLTP Kamojang Unit 5 Diresmikan

Minggu (5/7), Presiden Jokowi meresmikan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Kamojang dengan kapasitas 1x35 megawatt (MW). Peresmian dilakukan di wilayah kerja panas bumi (WKP) Kamojang, Garut, Jawa Barat. Sehubungan dengan makin terbatasnya sumber energi konvensional, Presiden memerintahkan kepada Menko Kemaritiman dan Menteri ESDM agar memprioritaskan pengembangan energi terbarukan.

"Kita ada kapasitas 28.000 MW di seluruh Indonesia untuk potensi panas bumi, ini sangat ramah lingkungan, tapi kita tidak pernah fokus ke sini," tegas Presiden.

PLTP Kamojang Unit 5 sendiri memiliki kapasitas 35 MW. Pembangkit dari energi panas bumi ini telah mulai beroperasi secara komersial pada hari Senin (29/6) pukul 00.00 WIB. Total investasi PLTP Kamojang Unit 5 ini sebesar US$104 juta atau sekitar Rp. 1,35 triliun.

Wilayah Kuasa Pengusahaan Kamojang ditetapkan berdasarkan SK Menteri Pertambangan No. 466/Kpts/M/Pertamb/74 tanggal 10 Agustus 1974 yang ditegaskan kembali melalui Keputusan Menteri ESDM No. 2067 K/30/MEM/2012 tanggal 18 Juni 2012. Wilayah Kerja Kamojang mempunyai potensi panas bumi hingga 300 MW. Lapangan Kamojang sendiri terletak di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. PLTP Kamojang Unit 1 beroperasi pada tahun 1982 sebesar 30 MW, diikuti Unit 2&3 serta Unit 4 masing-masing pada tahun 1988 dan 2008.

Provinsi Jawa Barat merupakan daerah dengan kontribusi panas bumi terbesar di Indonesia yang memiliki total potensi panas bumi sebesar 5,839 MW. Dari potensi tersebut, sebagian telah dioperasikan oleh 5 pengembang panas bumi dengan kapasitas total 1,129 MW yaitu PLTP Kamojang (200 MW), PLTP Drajat (270 MW), PLTP Wayang Windu (227 MW), PLTP Salak (377 MW), dan PLTP Patuha (55 MW).

Hingga saat ini terdapat 3 Wilayah Kerja dalam tahap eksplorasi yakni Cisolok Cisukarame (1x45 MW), Gn. Tangkuban Parahu (1x55 MW) dan Gn. Tampomas (1x40 MW) serta 1 Wilayah Kerja yang sedang dalam tahap *Engineering Procurement dan Construction* (EPC) yaitu Cibuni (1x10 MW). Menurut Wakil Gubernur Jawa Barat Dedy Miswar, PLTP Kamojang diharapkan dapat mendorong pemanfaatan penggunaan energi panas bumi di masa yang akan datang. (PSJ)

Presiden Joko Widodo meninjau lokasi PLTP Kamojang Unit 5 | Sumber foto: antaranews.com.

Program Strategis Nasional Tanggung Jawab Bersama

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan perlunya koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam menyukseskan Program 35.000 MW.

Program percepatan 35.000 MW merupakan program strategis nasional, karena itu penyelesaiannya merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Baik pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga terkait harus mensukseskan program ini.

Hal tersebut disampaikan Menteri ESDM Sudirman Said seusai memimpin rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kamis (9/7). Dalam rapat tersebut, Sudirman Said dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berkoordinasi dengan beberapa gubernur dan bupati/walikota, serta instansi kementerian/lembaga terkait proyek-proyek ketenagalistrikan di Sumatera, Jawa, dan Bali.

Menurut Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Agung Mulyana, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memuat ketentuan dimana kepala daerah wajib mendukung dan menyukseskan program strategis nasional.

"Kalau tidak mendukung program strategis dapat diberhentikan sementara selama tiga bulan. Lalu diberi kesempatan lagi, tapi setelah tiga bulan masih tetap tidak mendukung dapat diberhentikan tetap. Sekarang lebih keras dari UU sebelumnya," kata Agung pada saat konferensi pers bersama Menteri ESDM, Mendagri, dan Dirjen Ketenagalistrikan Jarman.

Tjahjo Kumolo mengapresiasi beberapa gubernur dan bupati yang telah menandatangani dukungan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ketenagalistrikan di daerah. Menurutnya gubernur harus mempunyai keberanian untuk memfasilitasi program ini.

"Karena Gubernur adalah tangan kanannya Presiden dan Menteri itu tangan kirinya Presiden, pemerintah itu satu, semua sepakat terus berkoordinasi menyelesaikan kendala-kendala yang ada," ungkap Tjahjo.

Dalam rapat koordinasi kali ini tiga kepala daerah menyatakan sikap dukungan terhadap program 35.000 MW. Adapun ketiga kepala daerah itu adalah Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Pelaksana Tugas Bupati Toba Samosir Liberty Pasaribu dan Bupati Humbang Hasundutan Maddin Sihombing. Pernyataan sikap resmi itu pun memuat klausul target penyelesaian proses perizinan paling lambat akhir 2015. Tjahjo berharap seluruh Kepala Daerah di Indonesia dapat memberikan dukungan terhadap program ketenagalistrikan nasional 35.000 megawatt (MW).

Pertemuan di Surabaya ini menurut Sudirman Said bukanlah pertemuan pertama. "Kita sepakat melanjutkan pertemuan ini sesudah lebaran dengan pembicaraan yang lebih teknis sehingga ketemunya adalah *problem solving*," ungkap Sudirman. Menteri ESDM berharap dalam satu dua bulan ke depan, hambatan-hambatan berupa rekomendasi perijinan yang harus diterbitkan oleh pemda itu sudah bisa diselesaikan. (PSJ)

ITB Dukung Program 35.000 MW

"Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam pembangunan ketenagalistrikan"
-Menteri ESDM Sudirman Said-

Institut Teknologi Bandung (ITB) siap mendukung Program Nasional Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 35.000 MW. Seluruh civitas akademika ITB siap membantu menyelesaikan proyek-proyek ketenagalistrikan tersebut baik dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Hal tersebut disampaikan Rektor ITB Kadarsah Suryadi dalam sambutan yang dibacakan oleh Wakil Rektor ITB Bermawi P Iskandar.

Sambutan tersebut dibsampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dengan tema 'Pembangunan Pembangkit 35.000 MW: Menguak Mimpi Menjadi Realita', Senin (3/8). Acara yang dipandu oleh Effendi Ghozali ini menghadirkan pembicara Menteri ESDM Sudirman Said, anggota BPK Rizal Djalil, serta ahli ketenagalistrikan ITB Pekik Argo Dahono. Rektor ITB menyampaikan bahwa institusinya akan menyiapkan insinyur-insinyur terbaik untuk pembangunan pembangkit.

"ITB sebagai aset bangsa siap menunjang cita-cita proyek besar tersebut. ITB akan menyiapkan kebutuhan insinyur," kata Wakil Rektor ITB Bermawi P Iskandar yang membacakan isi sambutan Rektor ITB Kadarsah Suryadi. ITB juga siap membantu BPK agar anggaran pembangunan benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Menurutnya program pembangunan ketanagalistrikan 35.000 MW adalah proyek besar, untuk itu fokus pembangunan jangan hanya pada pembangkit namun juga jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik.

Menurut Sudirman Said, keberadaan ITB sangat lekat dengan pembangunan bangsa Indonesia. "Bung karno lahir dari kampus ini, sangat cinta pada bangsa ini," ungkap Sudirman. Ia percaya bahwa ITB akan terus melahirkan tokoh2 bangsa yg menjadi pencerah dalam pembangunan.

Sudirman berpesan kepada civitas akademika muda ITB bahwa ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang pasti untuk meraih kesuksesan. Ia berharap para mahasiswa dan lulusan ITB dapat menjaga integritas dan otoritas keilmuan untuk kemajuan bangsa ini.

Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam pembangunan ketenagalistrikan. Untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam sektor ketenagalistrikan perlu adanya terobosan dan inovasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya. SDM yang berkualitas menurut Menteri ESDM adalah seseorang yang mau melakukan inovasi-inovasi. Mengutip sambutan Rektor ITB, Menteri ESDM menegaskan bahwa tidak ada hasil yang luar biasa jika dilakukan secara biasa. Program pembangunan 35.000 MW ini akan berhasil jika orang-orang berkualitas terlibat di dalamnya. (PSJ)

Program 35.000 MW Butuh Dukungan Pemda

Program percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi membutuhkan dukungan semua pihak, khususnya pemerintah daerah. Untuk itu pada Kamis (9/7) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengundang 2 gubernur, 16 bupati/walikota, serta 14 instansi kementerian/lembaga yang terkait dengan proyek-proyek ketenagalistrikan di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali. Dari undangan tersebut, satu gubernur, lima bupati/walikota, dan 7 pejabat setingkat eselon I hadir dalam rakor tersebut.

"Sementara yang lain, karena alasan penting seperti sedang umroh, bertugas di luar negeri dan tugas lain yang sudah terjadwal, diwakili oleh pejabat terkait," sebut Jarman.

Rapat koordinasi yang dilaksanakan di kota Surabaya ini merupakan pertemuan pertama yang bertujuan untuk mengurai permasalahan dan mencari solusi pembangunan proyek-proyek ketenagalistrikan. Dalam laporan penyelenggara Rakor tersebut, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman menyampaikan bahwa kehadiran pemerintah daerah sangat berarti untuk mengurai dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. "Sehingga proyek-proyek ketenagalistrikan dapat berjalan tepat waktu dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," tutur Jarman.

Menurutnya substansi permasalahan yang dibahas pada rapat koordinasi ini antara lain mengenai rekomendasi Gubernur/Bupati/Walikota untuk kelengkapan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), permasalahan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan permasalahan tata ruang.

Jarman berharap bahwa pada akhir rapat koordinasi ini para Gubenur, Bupati/Walikota, dengan diketahui oleh Menteri ESDM dan Mendagri dapat menandatangani kesepakatan penetapan target waktu penyelesaian permasalahan terkait dengan perizinan, lahan dan tata ruang di wilayah masing-masing. (PSJ)

- ***Atas-****Penandatanganan kesepakatan penetapan target waktu penyelesaian permasalahan perizinan, lahan, dan tata ruang.*
- ***Tengah****-Direktur Jenderal Ketenagalistrikan memaparkan Program 35.000 MW.*
- ***Bawah-****Peserta yang diundang berasal dari pemerintah daerah dan pusat yang terkait proyek kelistrikan di Sumatera, Jawa, dan Bali.*

Ranking *Getting Electricity* Indonesia Membaik

Peringkat *Getting Electricity* atau kemudahan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan listrik terus membaik. Jika di tahun 2012 Indonesia mendapat peringkat 162 di dunia, tahun 2014 lalu Indonesia menduduki ranking ke-78. Peringkat yang dikeluarkan oleh hasil survey World Bank ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan pemerintah dan kualitas pelayanan penyedia jasa tenaga listrik, termasuk di dalamnya PT PLN (Persero), terus membaik.

Meski Indonesia masih peringkat ke-6 di level ASEAN, namun dengan berbagai program dan perbaikan pelayanan, semua pihak optimistis peringkat Indonesia bisa terus meningkat. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Subdirektorat Perlindungan Konsumen Listrik Ridwan Dumroh dalam Sosialisasi Kebijakan Pelayanan di Bidang Ketenagalistrikan yang diselenggarakan di Palembang Sumatera Selatan, Rabu (2/9).

Sebelumnya Ridwan menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia harus mengetahui hak dan kewajibannya selaku konsumen listrik. Ia mengatakan bahwa dalam Peraturan Menteri ESDM No 33 tahun 2014, apabila PLN tidak dapat memenuhi deklarasinya atau melebihi 10% dari yang dijanjikan, maka PLN berkewajiban memberikan kompensasi sebesar 20% dari biaya bebannya. Hal-hal seperti itu harus diketahui masyarakat sebagai upaya perlindungan konsumen listrik.

Seperti disampaikan Ridwan Dumroh, sejak tahun 2002 Ditjen Ketenagalistrikan telah memberlakukan tingkat mutu pelayanan yaitu dengan mendeklarasikan 13 indiklator di antaranya kualitas, tegangan, frekuansi, pemadaman, penyambungan pelanggan baru dan perubahan daya, serta keakuratan pencatatan Kwh meter. UU No 30/2009 tentang Ketenagalistrikan menurutnya disusun dengan semangat memperbaiki pelayanan.

"Masalah pelayanan merupakan faktor yang perlu diutamakan dan menjadi tanggung jawab kita bersama," ujarnya. Dalam rangka perbaikan kemudahan mendapatkan listrik, Pemerintah telah melakukan beberapa hal antara lain menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 6347.E/20/DJL.4/2013 tanggal 18 Oktober 2013 Tentang Pencabutan Surat Edaran Direktur Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi Nomor 5916/04/600.3/1997 tentang Pembangunan,

Dalam sosialisasi dijelaskan jika masyarakat Indonesia harus mengetahui hak dan kewajibannya selaku konsumen listrik.

Pemasangan dan Pemeliharaan Instalasi Ketenagalistrikan, dengan pertimbangan untuk menghindari ketidakpastian dalam pelaksanaan pembangunan, pemasangan, dan pemeliharaan instalasi ketenagalistrikan.

Selanjutnya Menteri ESDM menerbitkan Permen ESDM Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan, sebagai payung hukum dalam pelaksanaan kemudahan mendapatkan listrik. Pemerintah berharap PT PLN (Persero), LIT-TR, dan Asosiasi Kontraktor Listrik diharapkan membuat sistem terintegrasi agar memudahkan akses kepada masyarakat, memudahkan prosedur mendapatkan listrik, menjadi acuan yang sama dalam memberikan pelayanan, serta menghilangkan calo.

Sosialisasi yang dihadiri pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan konsumen listrik ini menghadirkan beberapa pembicara seperti Kepala Subdit Tarif dan Subsidi Tenaga Listrik Jisman Hutajulu, Jajaran Manajer PT PLN (Persero), serta Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi. Pemerintah melalui PT PLN (Persero) ingin terus meningkatkan pelayanan. Kegiatan sosialisasi seperti diharapkan dapat meningkatkan keseriusan penyedia dalam melayani pelanggannya. (PSJ)

Dirjen Ketenagalistrikan Terapkan Sistem Informasi Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman menerapkan Sistem Informasi Seritifkasi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang merupakan sarana pendukung dalam pembinaan dan pengawasan terhadap setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan. Ini terkait dengan pembangunan proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt yang banyak didukung oleh investor asing. Kebanyakan investor asing tersebut membawa tenaga kerja dari tempatnya ke Indonesia. Padahal belum tentu tenaga kerja asing yang dibawa oleh investor berkompeten untuk bekerja di proyek tersebut.

Dengan adanya sistem informasi ini, proses pengawasan akan lebih mudah dilakukan.

"Sistem Informasi Sertifikasi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan perlu kita lakukan karena kita tahu bahwa dengan mulai masuknya investor asing, banyak juga mereka membawa tenaga kerja asing yang mungkin malah tidak punya kompetensi," ujar Jarman pada acara *coffee morning* Jumat (4/9) bertempat di Auditorium Samaun Samadikun, Gedung Ditjen Ketenagalistikan (DJK).

Tujuan utama penerapan standar kompetensi dan pelaksanaan sertifikasi Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan adalah menunjang usaha ketenagalistrikan dalam mewujudkan ketersediaan tenaga listrik yang aman, andal, dan ramah lingkungan, mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan pada usaha ketenagalistrikan, dan mewujudkan peningkatankompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan untuk menghadapi persaingan dengan tenaga kerja asing.

Menurut Jarman, database ini diberikan untuk memberikan informasi kepada semua pihak yang ingin berhubungan dengan kompetensi tenaga kerja di sektor tenaga listrik. Semua registrasi untuk sertifikasi tenaga teknik ketenagalistrikan pada 1 Januari 2016 nanti tidak ada lagi yang dilakukan secara manual, semuanya akan dilakukan secara online dan akan selesai dalam waktu satu hari. Dengan adanya sistem ini, proses pengawasan akan lebih mudah dilakukan, karena tenaga kerja yang tidak berkompeten maka tidak akan tercantum di dalam sistem ini.

DJK menerapkan Sistem Informasi Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sebagai pusat data dan informasi tentang tenaga teknik kompeten yang disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) terakreditasi maupun yang ditunjuk. Penggunaan sistem informasi ini dilakukan secara online, terutama untuk Registrasi Sertifikat Kompetensi yang melibatkan 3 (tiga) unsur yaitu DJK, LSK dan Tenaga Teknik. Tujuan dari sistem informasi ini untuk menyederhanakan proses pengesahan sertifikat kompetensi oleh pemerintah.

Saat ini terdapat 4 (empat) LSK yang terakreditasi Menteri ESDM dan 1 (satu) LSK yang ditunjuk Menteri ESDM sebagai lembaga penerbit sertifikat kompetensi. Jumlah seluruh penerbitan sertifikat kompetensi tenaga teknik untuk bidang pembangkitan tenaga listrik, bidang transmisi tenaga listrik, bidang distribusi tenaga listrik dan bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik sebanyak 31.324 sertifikat kompetensi. Terkait dengan sertifikasi kompetensi tenaga teknik, sampai saat ini Kementerian ESDM telah menetapkan dan memberlakukan standar kompetensi sebanyak 2.804 unit kompetensi untuk keempat bidang kompetensi tersebut. (UH)

Ditjen Ketenagalistrikan Sosialisasikan Aturan tentang SUTT, SUTET dan SUTTAS

Masyarakat yang tinggal di bawah ruang bebas Saluran Umum Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Umum Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS) secara teknis aman selama masih berada di luar ruang bebas. Selain itu, ruang di bawah ruang bebas dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain selama tidak masuk ke dalam ruang bebas.

Hal tersebut disampaikan Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Munir Ahmad saat menyampaikan presentasi mengenai sosialisasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS) untuk penyaluran tenaga listrik.

Menurut Munir, Pembangunan SUTT, SUTET dan SUTTAS dilaksanakan dengan memenuhi aspek keselamatan ketenagalistrikan dengan berpedoman kepada jarak ruang bebas minimum. Ia menyampaikan bahwa Peraturan Menteri ESDM ini dapat dijadikan referensi terhadap peraturan lain di daerah terkait dengan penggunaan tanah dan pertimbangan perbankan. Menurut Munir, Permen ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dimana pembangunan ketenagalistrikan menganut asas keamanan dan keselamatan dan setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan yang andal dan aman bagi instalasi, aman dari bahaya bagi manusia dan mahluk hidup, dan ramah lingkungan.

Dalam paparannya Munir menjelaskan bahwa definisi Ruang Bebas adalah ruang sekeliling penghantar yang dibentuk oleh jarak bebas minimum sepanjang SUTT atau SUTET, yang di dalam ruang itu harus dibebaskan dari benda-benda dan kegiatan lainnya. Sedangkan jarak bebas minimum vertikal adalah jarak terpendek secara vertikal antara konduktor SUTT, SUTET atau SUTTAS dengan permukaan bumi atau benda di atas permukaan bumi yang tidak boleh kurang dari jarak yang telah ditetapkan demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi SUTT, SUTET dan SUTTAS. Sedangkan jarak bebas minimum horizontal adalah jarak terpendek secara horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang ke bidang vertikal ruang bebas; bidang vertikal tersebut sejajar dengan sumbu vertikal menara/tiang dan konduktor.

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Munir menyampaikan sosialisasi Permen ESDM 18/2015.

Munir menjelaskan bahwa permen ESDM No.18/2015 ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemegang Izin Operasi dalam pembangunan, operasi, dan pemeliharaan SUTT, SUTET dan SUTTAS untuk memenuhi keselamatan ketenagalistrikan, serta menentukan obyek Kompensasi tanah, bangunan dan tanaman di bawah Ruang Bebas SUTT, SUTET dan SUTTAS. (PSJ)

Stakeholder dari berbagai sektor diundang dan memberikan masukan dalam sesi tanya-jawab.

Dorong Pembangkit Batubara, Pemerintah Lakukan Relaksasi Regulasi

Dirjen Ketenagalistrikan Jarman membuka PAMERINDO 2015 di JI Expo, Jakarta pada Rabu (16/9).

Pemerintah terus mendorong pembangunan pembangkit listrik dengan bahan bakar batubara. Hingga tahun 2025, sekitar 50 persen pembangkit listrik akan menggunakan PLTU berbahan bakar batubara. Batubara akan menggantikan bahan bakar minyak yang akan berkurang hingga menjadi satu persen di tahun 2025. Untuk itu pemerintah telah melakukan relaksasi terhadap regulasi-regulasi untuk mensukseskan program 35.000 MW yang ditargetkan selesai di tahun 2019.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman saat membuka PAMERINDO – *Electric, Power, and Renewable* Indonesia 2015, Rabu (16/9). Pameran yang dilaksanakan di Jakarta Internasional Expo Kemayoran ini juga dimeriahkan dengan *Conference of Indonesian Electrical Power Society* (CIEPS) 2015 yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ketengalistrikan Indonesia (MKI).

Menurut Jarman, pertumbuhan listrik dalam lima tahun terakhir tumbuh pesat dengan naiknya angka kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik. Namun menurutnya tambahan tersebut masih kurang untuk mencukupi kebutuhan listrik masyarakat Indonesia. Ia mengatakan bahwa kebutuhan listrik 35.000 MW dalam lima tahun ke depan telah direncanakan Pemerintah dengan melakukan relaksasi regulasi untuk mempermudah pembangunan ketenagalistrikan. Relaksasi peraturan tersebut dilakukan karena pemerintah telah belajar dari program-program pembangunan ketenagalistrikan sebelumnya.

"Peraturan tersebut diharapkan dapat mengurangi hambatan-hambatan," tegas Jarman.

Jarman menyampaikan bahwa kebutuhan energi harus bisa menopang pertumbuhan ekonomi. Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, solusi yang memungkinkan adalah mengejar dengan pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batubara. Hal tersebut dilakukan untuk megejar rasio elektrifikasi Indonesia yang saat ini mencapai sekitar 86%.

"Dibandingkan negara tetangga yang diatas 96% kita tentu masih tertinggal," ungkapnya. Hal ini menurut Jarman adalah tantangan sebab dibalik 14% yang belum berlistrik ada 40 juta penduduk dan 9,5 juta kepala keluarga belum mendapatkan akses terhadap listrik.

Meski lebih tinggi daripada India, rasio elektrifikasi Indonesia masih rendah dibandingkan dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura. Jarman mengharapkan pameran dan seminar yang diselenggarakan oleh Pamerindo dan MKI ini dapat memberikan masukan bagi program-program yang direncanakan oleh pemerintah. Menurut Jarman, pemerintah membutuhkan dukungan berupa pikiran-pikiran yang jernih dari anggota-anggota MKI dan para pelaku usaha dalam membantu mencari solusi khususnya untuk program 35.000 MW.

Usai membuka seminar, Jarman mengunjungi stan-stan pameran yang diikuti oleh para pelaku usaha di sektor ketenagalistrikan. (PSJ)

Presiden Resmikan Dimulainya Pembangunan PLTU Batang

Jumat (28/8), Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan dimulainya proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah berkapasitas 2 x 1.000 megawatt (MW). Presiden Jokowi didampingi Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir menekan tombol sirine. Selain itu dalam kesempatan tersebut Jokowi juga meresmikan pengoperasian pembangkit listrik di wilayah terluar dan perbatasan Indonesia.

Jokowi mengatakan, proyek ini menjadi model bahwa setiap masalah pembangunan infrastruktur bisa dipecahkan. Ia memastikan bahwa tidak ada keraguan investasi bisa berjalan. Jokowi menegaskan, listrik yang dihasilkan dari PLTU Batang tidak hanya akan menggerakkan industri besar hingga kecil, namun juga akan membantu banyak rakyat Indonesiasebab PLTU ini akan masuk dalam jaringan listrik Jawa-Bali.

Dimulainya konstruksi PLTU Jawa Tengah ini menurut Jokowi merupakan bukti pemerintah dalam membantu investor menyelesaikan persoalan investasi. Proyek PLTU terbesar di ASEAN ini melalui jalan panjang sebelum bisa diresmikan.

"Oleh sebab itu, proyek yang sudah empat tahun tertunda ini, saya dorong terus untuk segera diselesaikan dan sekarang sudah bisa konstruksi," ungkap Jokowi. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin ada lagi proyek yang terhambat karena proses perizinan ataupun pembebasan lahan.

"Optimislah bahwa semua problem investasi bisa diselesaikan. Investor jangan ragu lagi," tegas dia.

PLTU Batang (2 x 1.000 MW) dikerjakan oleh PT Bhimasena Power Indonesia (BPI). Presiden meminta agar pelaksana dapat bekerja seoptimal mungkin. Dirinya akan secara mendadak mengecek kemajuan dari pengerjaan proyek pembangkit listrik ini.

"Saya akan tagih kesanggupan proyek ini diselesaikan dalam 40 bulan dan selesai 2018," ujarnya.

Proyek PLTU Jawa Tengah ini didanai ekuitas BPI dan Japan Bank for International Cooperation. Jangka waktu perjanjian jual beli listrik adalah 25 tahun dengan harga listrik USS 5,79 per kilowatt hour (kWh). Nantinya, pembangkit ini akan menggunakan teknologi *Ultra Super Critical* (USC) yang merupakan teknologi mutakhir dan saat ini terbesar di Asia Tenggara. (PSJ)

Presiden Joko Widodo meresmikan dimulainya proyek PLTU Batang di Kabupaten Batang, Jawa Tengah (28/8).

Komposisi EBT Tahun 2025 Ditargetkan 23%

Pemerintah menargetkan komposisi bauran energi (*energy mix*) untuk pembangkit listrik dari Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23% di tahun 2025. Saat ini pembangkit listrik dari air, panas bumi, dan energi terbarukan lainnya baru mencapai sekitar 11%. Dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun, kapasitas pembangkit listrik dari EBT harus bertambah 12%. Hal tersebut disampaikan Dirjen Ketenagalistrikan Jarman saat membuka Rapat Pleno Penyusunan Draft Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang digelar di kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Selasa (8/7).

Menurut Jarman, dengan terbitnya RUKN nanti, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN harus mengacu pada RUKN. "Sesuai RUKN, ada komponen *energy mix* yang harus dipenuhi, dimana tahun 2025, 23% energi primer pembangkit listrik berasal dari energi baru terbarukan. Dalam tempo sepuluh yang akan datang, 11,5% naik menjadi 23%," tegas Jarman.

Selain kebijakan bauran energi, RUKN ini menargetkan kenaikan Rasio Elektrifikasi (RE) nasional menjadi 99% di tahun 2020. Menurut Jarman, untuk mencapai target tersebut dibutuhkan tambahan rasio lektrifikasi sebesar 3% per tahun atau penambahan sekitar tiga juta sambungan listrik baru per tahun. Jarman juga menyampaikan bahwa dalam RUKN ini pemerintah memberikan porsi yang lebih besar kepada swasta dalam penyediaan tenaga listrik. Untuk itu pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan-kebijakan yang mempermudah swasta untuk berinvestasi di sektor ketenagalistrikan.

Dalam RUKN ini juga diatur kebijakan pemberian subsidi listrik yang lebih tepat sasaran. Saat ini subsidi diberikan pada pelanggan listrik 450 dan 900 VA, ke depan penerima subsidi akan dicocokkan dengan daftar penduduk miskin, sehingga subsidi listrik dapat lebih tetap sasaran.

Menurut Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alihuddin Sitompul, draft RUKN ini sudah disusun oleh tim perumus sejak tahun 2014.

"Tim menyelenggarakan delapan kali rapat dan tiga kali FGD untuk mendapatkan masukan-masukan," ungkap Alihuddin.

Selain kebijakan bauran energi, RUKN menargetkan kenaikan rasio elektrifikasi nasional menjadi 99% di tahun 2020.

Sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, RUKN diterbitkan setelah didiskusikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut Jarman, pemerintah telah mencoba mendiskusikan draft RUKN dengan DPR namun belum mendapat hasil karena saat itu Kebijakan Energi Nasional (KEN) belum disahkan.

Saat ini KEN telah disahkan, sehingga RUKN akan segera diajukan untuk dibahas bersama DPR RI. Dengan terbitnya RUKN nanti, setiap daerah diwajibkan memiliki Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) yang mengacu pada target-target yang ada dalam RUKN.

Dalam rapat pleno draft RUKN tahun 2015-2034 ini, Ditjen Ketenagalistrikan mengundang Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah, pemegang izin usaha ketenagalistrikan, tim penyusun RUKN, dan *stakeholder* lainnya. Menurut Alihuddin, hasil dari forum ini akan digunakan sebagai masukan untuk penyempurnaan draft RUKN sebelum diajukan kembali ke DPR. RUKN ini akan direview secara berkala setiap tiga tahun. Dengan cara ini, RUKN dapat menampung dinamika yang muncul di masyarakat. (PSJ)

Registrasi SLO Online Raih Juara II Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) Sujatmiko mewakili DJK menerima penghargaan untuk SLO Online yang meraih juara II dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.

Bertepatan dengan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-70 tahun 2015 yang dilaksanakan Senin (28/9) lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said memberikan penghargaan juara II Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian ESDM kepada Registrasi Sertifikasi Laik Operasi (SLO) secara online yang dilaksanaka di Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Sujatmiko maju untuk menerima penghargaan.

Registrasi SLO Online mengikuti kompetisi pelayanan publik dalam kategori I, yaitu kategori Perbaikan pemberian pelayanan kepada masyarakat. SLO Online mendapat nilai 72,625 di bawah pelayanan Aplikasi Akuisisi Data Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat oleh Ditjen EBTKE. SLO Online menghalahkan Sistem Pelayanan Online Rekomendasi Teknis Air Tanah yang dilaksanakan oleh Badan Geologi serta Jasa Riset, Laboratorium dan Expertise Minyak dan Gas Satu Jari yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM. Sementara itu pelayanan Minerba One Map Indonesia (MOMI) oleh Ditjen Mineral dan Batubara memperoleh juara umum dengan nilai 78.

Pembangunan sistem informasi SLO Online berawal dari adanya upaya perbaikan rating indikator Getting Electricity Indonesia. Peringkat Indonesia dalam getting electricity masih rendah karena banyaknya prosedur yang harus dilalui masyarakat untuk mendapatkan listrik. Registrasi Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Online memudahkan dalam pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan kelaikan instalasi tenaga listrik. Dengan SLO online, registrasi SLO untuk instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah yang awalnya diterbitkan dalam waktu 7 (tujuh) hari dipercepat menjadi paling lambat 3 (hari). Sebelumnya registrasi SLO dilakukan secara manual melalui persuratan dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan SLO Online, proses pelayanan menjadi lebih cepat dan menghemat pemakaian kertas.

Untuk mempermudah penyimpanan data yang sebelumnya dilakukan secara manual (penyimpanan data cetak), Ditjen Ketenagalistrikan membuat database secara online untuk melakukan registrasi SLO. Dengan data base ini, berkas yang semakin lama bertambah banyak dapat diatasi. Selain itu database mencegah berkas menjadi rusak atau hilang, serta mempermudah dalam melakukan pencarian, rekapitulasi dan pemutakhiran data.

Sistem Database Registrasi SLO Online ini dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan registrasi SLO secara online oleh Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) dan sekaligus sebagai media penyimpanan data-data sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik di Indonesia yang meliputi instalasi penyediaan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik yang kemudian dihimpun dalam suatu sistem database yang terintegrasi secara online dan mudah untuk diakses oleh Pemerintah, pelaku usaha di bidang ketenagalistrikan maupun oleh masyarakat sebagai konsumen listrik. (PSJ)

Pemerintah Tawarkan Kemudahan Investasi Listrik di World Expo 2015

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alihuddin Sitompul menawarkan kemudahan investasi sektor ketenagalistrikan kepada pengusaha-pengusaha dalam ajang forum bisnis di Pavilion Indonesia World Expo Milano 2015, Jumat (25/9).

Forum bisnis ini dihadiri oleh pengusaha-pengusaha Italia yaitu Ansaldo Energia SpA, Exergy, Novapower, I.B.A.S dan Green Energy Geothermal Ltd. Forum bisnis sendiri dikoordinasi oleh Pusat Komunikasi Publik KESDM dengan menghadirkan narasumber dari Ditjen Ketenagalistrikan KESDM dan Badan Litbang ESDM.

Dalam paparannya Alihuddin menyampaikan bahwa kebutuhan akan tenaga listrik di Indonesia sangat besar, sehingga Pemerintah mencanangkan program pengembangan 35.000 MW untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Alihuddin memastikan bahwa sumber energi utama dalam negeri harus dipergunakan secara maksimal sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional untuk memastikan ketersediaan pasokan secara berkelanjutan.

"Kapasitas terpasang saat ini hanya mampu memenuhi kebutuhan listrik sebesar 86.39%. Sementara dalam waktu lima tahun ke depan, permintaan listrik akan meningkat rata-rata 8.7% per tahun dengan prediksi elektrifikasi rasio mencapai 97,4% pada tahun 2019," ungkap Alihuddin kepada peserta forum bisnis.

Menurut Alihuddin, rasio elektrifikasi di Indonesia masih dibawah 90%, bahkan dibawah negara-negara tetangga. Sementara negara tetangga yang paling dekat dengan kita, Malaysia sudah mencapai 97% dan bila dibandingkan dengan negara yang kurang lebih sama karakternya dengan Indonesia juga masih lebih rendah, yaitu Brasil (93%) dan Thailand (98%).

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alihuddin Sitompul memaparkan peluang investasi ketenagalistrikan di Indonesia kepada pengusaha Italia dalam Bussines.

Paparan mengenai energi angin di Indonesia disampaikan oleh Peneliti Madya ESDM Verina Januarti Warga Dalam.

Verina menyampaikan energi angin di Indonesia memiliki potensi yang bagus untuk dikembangkan.

Alihuddin Sitompul mengungkapkan pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mempercepat pengembangan listrik di Indonesia.

Forum Bisnis di World Expo Milano ini dihadiri oleh pengusaha dan investor dari seluruh dunia.

Alihuddin menyampaikan bahwa untuk mempercepat pengembangan listrik dan juga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan listrik, Kementerian ESDM menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2015 untuk mengatur prosedur pembelian tenaga listrik melalui pemilihan langsung dan penetapan harga patokan untuk mengatur prosedur pembelian tenaga listrik melalui pemilihan langsung dan penetapan harga patokan.

Selain itu kemudahan lain yang ditawarkan adalah Peraturan Menteri Nomor 01/2015 untuk meningkatkan pasokan listrik dan menambah kapasitas pembangkit melalui kerjasama dengan para pengusaha, dan juga menerapkan skema *Power Wheeling*. Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan pengembangan jaringan transmisi untuk memastikan keselamatan, kepastian, dan efisiensi sistem operasi dan pembangunan. Presentasi ini menarik minat investor yang hadir dalam forum bisnis tersebut. Mereka akan mempertimbangkan tawaran dari pemerintah Indonesia yang disampaikan oleh Alihuddin.

Selain Alihuddin, Peneliti Madya Badan Litbang ESDM, Verina Januarti Warga Dalam menyampaikan potensi energi angin di Indonesia untuk dikembangkan oleh investor. Menurut Verina, angin di Indonesia memiliki potensi yang bagus untuk dikembangkan karena hembusan angin di Indonesia tidak terlalu kuat hingga menyebabkan angin topan. "Namun cukup kuat untuk dapat menggerakkan kincir angin berkapasitas 2 MW," ungkapnya.

Menurut Verina, lahan yang ada di Indonesia akan cukup untuk digunakan dalam mengembangkan energi angin dengan produksi yang akan dihasilkan dapat mencapai 60.000 MW. Menurutnya banyak kajian yang telah dilakukan dan hasilnya menunjukkan bahwa energi angin di Indonesia akan memberikan keuntungan yang besar sama dengan proyek-proyek pengembangan energi angin di negara lain. (PSJ)

Pemerintah Tingkatkan Kualitas SDM untuk Energi Nuklir

Energi nuklir belum masuk dalam komposisi bauran energi untuk pembangkit listrik di Indonesia. Meskipun begitu, Indonesia perlu menyiapkan sumber daya manusia yang handal agar mampu mengimbangi permintaan ketika pembangkit listrik tenaga nuklir diwujudkan. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan terkait penelitian nuklir. Menteri ESDM Sudirman Said sendiri dalam kesempatan tersebut mendukung upaya Kemenristekdikti untuk menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan pengembangan PLTN, sehingga ketika sudah diterima oleh publik, nuklir bisa benar-benar aman dan bermanfaat bagi pembangunan.

Para narasumber dan moderator dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Kementerian ESDM.

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Intan Ahmad dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Kementerian ESDM, di Aula Barat Institut Teknologi Bandung, Senin (3/8).

Menurut Intan, Kemenristekdikti akan mendorong program studi terkait nuklir untuk meningkatkan jumlah ahli nuklir dalam rangka mengembangkan wacana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Selain itu, Kemenristekdikti akan memperkuat kerja sama dengan institusi lain

Menurut hasil survei 2010-2014, peningkatan penerimaan masyarakat di Jawa, Bali, dan Madura terhadap manfaat nuklir semakin meningkat. Bahkan pada 2014, data menunjukkan penerimaan masyarakat pada nuklir sebesar 72 persen.

"Ini tanda masyarakat sudah memahami manfaat nuklir. Dengan melihat angka tersebut, sudah saatnya kita perlu mendorong wacana pengembangan pembangunan PLTN," kata Intan.

Meski Indonesia memiliki sejumlah ahli nuklir berkelas dunia, namun menurut Intan perlu ditingkatkan jumlahnya. "Kami akan mendorong kekuatan di kampus-kampus yang memiliki program studi terkait nuklir seperti ITB, UI, dan UGM," ujar Intan.

Ia menambahkan berdasarkan hasil kajian, PLTN sudah siap dibangun di tapak Bangka. Selain itu juga sedang dikembangkan untuk Tapak Muria, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Banten, dan Batam. "Namun, keputusannya dikembalikan kepada Kementerian ESDM," ungkapnya.

Institut Teknologi Bandung (ITB) sendiri siap membantu pemerintah dengan menyiapkan tenaga-tenaga ahli dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. "ITB sebagai aset bangsa siap menunjang cita-cita proyek besar tersebut. ITB akan menyiapkan kebutuhan insinyur," ungkap Wakil Rektor ITB Bermawi P Iskandar yang membacakan isi sambutan Rektor ITB Kadarsah Suryadi.

Pembangunan pembangkit berbasis energi apapun pasti membutuhkan tenaga ahli, begitu pula dengan operasional dan perawatan pembangkit tersebut. Dalam diskusi juga mewacanakan kebutuhan akan SDM untuk proyek-proyek infrastruktur ketenagalistrikan harus dari orang Indonesia. Hal ini sekaligus sebagai bentuk apresiasi atas potensi besar generasi bangsa serta wadah kontribusi untuk memajukan bangsa ini. (PSJ)

Pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk mendorong pembangunan PLTP.

Pemerintah Terus Dorong Panas Bumi untuk Pembangkit Listrik

Panas Bumi adalah energi masa depan, untuk itu pemerintah terus mendorong pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman dalam Diskusi Panel acara Indonesia *International Geothermal Convention And Exhibition* (IIGCE) yang dilaksanakan serangkaian dengan EBTKE Conect di Jakarta Convention Center, Rabu (19/8). Dalam diskusi yang dipandu oleh Ahmad Yuniarto dari INAGA ini menghadirkan pembicara dari Kementerian Energi Selandia Baru, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Koordinator Perekonomian.

Pemerintah menurut Jarman telah melakukan berbagai langkah untuk mendorong pembangunan PLTP. Langkah-langkah tersebut antara lain dengan memperbaiki UU panas bumi, menarik perizinan panas bumi ke pusat, serta menyatukan perizinan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Selain itu pemerintah memantau proyek-proyek ketenagalistrikan melalui *Project Management Office* (PMO) dan Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional (UP3KN).

Dari bauran energi untuk pembangkit listrik, sampai akhir tahun 2014 komposisi untuk Energi Baru Terbarukan (EBT) hanya sekitar 11,5%. Kebijakan Energi Nasional (KEN) mengamanatkan bahwa komposisi EBT di tahun 2025 adalah sekitar 25%. Untuk itu Jarman menyampaikan bahwa draft Rencana Umum Ketenagalistrikan nasional (RUKN) yang akan diterbitkan menyesuaikan KEN.

Jarman juga menyampaikan evaluasi *Fast Track Program* (FTP) I dan II lebih fokus pada pemilihan penyedia dengan harga terendah, namun kurang memperhatikan pendanaan kemampuan teknikal dan finansial peserta. Untuk FTP II yang fokus pada EBT, baru 85 MW pembangkit yang COD sedangkan 17.333 MW belum COD.

"Ini menjadi tantangan kita karena geothermal dalam FTP II mendapat porsi yang cukup besar yaitu 4,8 GW," ujar Jarman. Menurutnya di tahun 2025 nanti paling tidak 30 GW pembangkit listrik berasal dari *renewable energy* dan yang terbesar adalah *geothermal*.

Dalam diskusi, Jarman menyampaikan bahwa kebijakan konservasi energi dapat dilakukan dengan kebijakan subsidi yang tepat. Saat ini pemerintah telah menerapkan kebijakan tarif addjusment untuk tarif listrik golongan di atas 1.300 VA. Menurutnya yang harus dilakukan pemerintah adalah terus mengedukasi masyarakat. "Prinsip konservasi adalah *press policy* dan merubah *mindset* masyarakat," ungkapnya. (PSJ)

Dirjen Tetapkan Komite Manajemen Aturan Jaringan Sulawesi

Pemerintah melalui Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 236K/73/DJL.3/2015 tanggal 03 Juni 2015 telah menetapkan keanggotaan Komite Manajemen Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Sulawesi. Tugas-tugas Komite tersebut disampaikan Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Satya Zulfanitra dalam Seminar dan Launching Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Sulawesi yang dilaksanakan pada Jumat (26/6) di Hotel HARRIS Sentul City Bogor.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Satya Zulfanitra membuka Seminar Pengembangan Bisnis Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Bogor (26/6).

Menurut Satya, salah satu tugas Komite Manajemen adalah mengkaji usulan yang disampaikan oleh Pemakai Jaringan atau pihak yang berkepentingan untuk perubahan Aturan Jaringan. Selain itu komite ini bertugas mempublikasikan setiap rekomendasi untuk perubahan Aturan Jaringan yang oleh Komite Manajemen dianggap perlu atau diinginkan, termasuk alasan-alasan untuk rekomendasi tersebut. Satya juga menyampaikan bahwa komite bertugas menerbitkan interpretasi dan pedoman atas Aturan Jaringan termasuk implementasinya apabila diperlukan oleh Pemakai Jaringan atau pihak yang berkepentingan.

"Komite juga membuat rekomendasi untuk perubahan Aturan Jaringan untuk Keadaan yang Belum Diatur dalam Aturan Jaringan," ungkap Satya dalam pembukaan seminar tersebut. Seminar yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan seperti PLN, IPP, dan konsumen ini merupakan bentuk tindak lanjut peraturan Menteri ESDM Nomor 02 Tahun 2015 tentang Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Sulawesi. Salah satu amanat dalam Peraturan Menteri tersebut adalah untuk membentuk Komite Manajemen Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Sulawesi.

Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Sulawesi merupakan seperangkat peraturan, persyaratan dan standar untuk menjamin keamanan, keandalan serta pengoperasian dan pengembangan sistem yang efisien dalam memenuhi peningkatan kebutuhan tenaga listrik pada Sistem Tenaga Listrik Sulawesi. Mengingat akan semakin meningkatnya utilitas jaringan, aturan jaringan inilah yang akan memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban semua pelaku usaha dan pemakai jaringan pada Sistem Tenaga Listrik Sulawesi. Menurut Satya, aturan jaringan ini disusun berdasarkan kondisi struktur sistem tenaga listrik saat ini sehingga harus selalu dimutakhirkan sejalan dengan perkembangan kondisi sistem dan struktur usaha serta perubahan kompleksitas sistem. Dalam kesempatan tersebut, Satya juga menyebutkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Aturan Jaringan seperti Manajemen Jaringan (*Grid Management Code*), Aturan Penyambungan (*Connection Code*), Aturan Operasi (*Operation Code*), Aturan Perencanaan dan Pelaksanaan Operasi (*Scheduling and Dispactch*), Aturan Transaksi Tenaga Listrik (*Settlement Code*), Aturan Metering (*Metering Code*), Aturan Kebutuhan Data (*Data requirement Code*), dan Aturan Tambahan. Satya berharap para pemangku kepentingan dapat menjalankan Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik khususnya sistem Sulawesi. (MH/PSJ)

Ketelatenan dan Akurasi Data Kunci Pengendalian *Losses*

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) sebagai penyedia listrik harus memperhatikan upaya-upaya penurunan susut jaringan (*losses*). Para Manajer PLN di area dan rayon harus benar-benar paham kondisi jaringan. Dengan berbekal ketelatenan dan akurasi data di lapangan, permasalahan-permasalahan jaringan dapat segera diatasi dan target penurunan *losses* dapat tercapai. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman saat membuka Workshop Pengendalian Susut Jaringan Tenaga Listrik yang diselenggarakan di Yogyakarta, Senin (24/8).

Menurut Jarman, PLN harus belajar dari penyedia jasa listrik negara-negara ASEAN yang telah berhasil menurunkan *losses*. Meski kondisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki tantangan tersendiri, bukan berarti PLN pesismistis dengan keadaan yang ada. Jarman berharap masing-masing Manajer Wilayah hingga Rayon dapat mengenali kondisi jaringan di daerahnya serta belajar dari perusahaan penyedia listrik di luar negeri memiliki kondisi serupa. "Manajer (PT PLN) Area dan Rayon harus paham jaringan mana yang harus diperbaiki dan diperhatikan," tegasnya.

Untuk memetakan jaringan di masing-masing daerah, Jarman menyarankan agar PLN manfaatkan lulusan SMK. Menurutnya pemetaan jaringan dengan sistem database sangat bermanfaat untuk memetakan penurunan *losses*. Ia juga berharap workshop yang dihadiri para pelaksana teknis

Dirjen Ketenagalistrikan Jarman mengakui sistem pendataan menjadi tantangan dalam penurunan losses

di masing-masing PLN Area se-Jawa, Bali dan Sumatera ini mencari hambatan-hambatan penurunan *losses* di lapangan. "Tantangan kita adalah sistem pendataan," ungkapnya.

Untuk melakukan pendataan yang baik, ia menghimbau agar memanfaatkan informasi dan teknologi. Jarman mencontohkan registrasi Sertifikasi Laik Operasi (SLO) yang dilaksanakan di Ditjen Ketenagalistrikan. Saat ini rata-rata 10.000 SLO diregister secara online setiap hari melalui sistem database. Dengan cara itu menurutnya tidak ada lagi SLO yang bodong, semua dapat termonitor.

Workshop yang diselenggarakan dua hari ini juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan PT. PLN ke pelanggan menjadi lebih baik. Ia kembali mengingatkan PT. PLN agar menindak pencurian listrik yang dapat menyebabkan *losses* non teknis. Apabila ada konsumen yang dengan unsur kesengajaan melakukan pencurian listrik, PLN diharap segera melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk ditindak secara hukum.

Himbauan Dirjen Ketenagalistrikan agar PLN lebih telaten dan memanfaatkan database untuk pengendalian *losses* tersebut diamini oleh Direktur PT PLN (Persero) Iwan Supangkat. Ia mengajak jajarannya untuk lebih telaten dan segera melakukan pendataan terhadap jaringan-jaringan yang dimiliki oleh PT PLN (Persero). (PSJ)

Dirjen Ketenagalistrikan Tegaskan Pentingnya Pengendalian *Losses*

Dirjen Ketenagalistrikan Jarman menyampaikan bahwa losses harus dipahami secara teknis oleh semua pihak, khususnya PT PLN (persero).

Pengendalian terhadap susut jaringan tenaga listrik (*losses*) adalah hal yang harus dipahami semua pihak khususnya pelaku usaha ketenagalistrikan. Pasalnya saat ini pemerintah hanya mensubsidi sekitar sepertiga dari bisnis PT PLN (Persero), sedangkan dua pertiganya sudah merupakan tarif keekonomian. Pengendalian *losses* penting agar kerugian besar tidak ditanggung oleh penyedia maupun konsumen listrik.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman dalam Seminar Bedah Susut Jaringan Tenaga Listrik PT PLN (Persero) yang diselenggarakan oleh Ditjen Ketenagalistrikan di Auditorium Samaun Samadikun, Rabu (26/8).

Dalam sambutannya Jarman menyampaikan bahwa *losses* adalah hal yang harus dipahami secara teknis oleh semua pihak khususnya PT PLN (Persero). Dengan membedah secara detail apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi *losses*, pengendalian dapat dilakukan dan memberikan manfaat bagi banyak orang.

Menurutnya *losses* bisa terjadi pada jaringan transmisi dan distribusi. Untuk menurunkan *losses* transmisi, Dirjen berharap PT PLN (Persero) dapat belajar dari pengendalian susut jaringan di luar negeri khususnya di kota New York dan Tokyo. Selain itu ia berharap pada jaringan distribusi, *losses* dapat dikendalikan dengan memperhatikan setiap titik penyambungan baru. "Jangan sampai satu saluran kabelnya sangat panjang," jelas Dirjen.

Jarman kembali menyampaikan bahwa hal terpenting dalam pengendalian susut jaringan adalah ketelatenan dari para pelaksana di lapangan.

Ia kembali mengajak semua pihak untuk melakukan pendataan dengan menggunakan para lulusan SMK atau tenaga *outsourcing*. Ia juga menegaskan kembali pentingnya peran Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PT PLN (Persero). Jika terdapat indikasi kesengajaan dalam pencurian listrik, PLN diharap melaporkannya kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagalistrikan.

Peserta seminar berasal dari PT PLN (persero) dan stakeholder ketenagalistrikan lainnya.

Seminar yang diselenggarakan dalam satu hari ini menghadirkan berbagai pembicara terkait susut jaringan. Ditjen Ketenagalistrikan meminta bantuan pakar dan senior-senior PT PLN yg berpengalaman di bidang *losses* untuk menjelaskan dan memberikan pencerahan tentang apa itu susut jaringan. "Kita hadirkan pakar-pakar yang bisa melihat *losses* apa adanya," ungkap Jarman.

"Kami harapkan hasil pertemuan ini membawa pengertian diantara kita apa itu teknis pengendalian susut jaringan," tambahnya. (PSJ)

Salah satu tantangan di Kalimantan adalah mengejar ketertinggalan rasio elektrifikasi yang baru mencapai 84.35%.

Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan di Kalimantan Dipercepat

Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah se-Kalimantan berkomitmen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur energi termasuk bidang ketenagalistrikan di pulau Kalimantan. Pemerintah daerah melalui dinas terkait berkomitmen menyederhanakan proses perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan perbaikan iklim investasi. Hal tersebut disampaikan Gubernur BI Agus D.W. Matowardojo dalam Konferensi Pers usai Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah Bersama BI dengan tema Kedaulatan Energi: Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Energi untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan.

Acara yang dilaksanakan di Kota Balikpapan, Selasa (11/8) ini dihadiri juga oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak, Kepala Unit Pengendali Kinerja (UPK) Kementerian ESDM Widyawan Prawiraatmadja, Dirut PT PLN dan Kepala SKK Migas. Hadir juga dalam kesempatan tersebut para pejabat Eselon I Kementerian ESDM termasuk diantaranya Dirjen Ketenagalistrikan Jarman.

Menurut Agus D.W. Martowardojo, sampai saat ini progres pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Kalimantan terus berjalan meskipun masih mengalami tantangan yang perlu segera diselesaikan, "Sejumlah tantangan tersebut antara lain terkait aspek lahan dan perizinan termasuk di Kalimantan," ujar Agus. Meskipun begitu, Ia mengapresiasi Kementerian ESDM yang menjadikan pengembangan infrastruktur energi sebagai prioritas dengan memberikan relaksasi perizinan.

"Selain relaksasi juga dilakukan penyederhanaan prosedur penetapan harga jual listrik serta perpanjangan jaminan kontrak hingga mencapai 25 tahun," ungkap Agus.

Menurut Kepala UPK Kementerian ESDM Widyawan, peran pemerintah daerah di Kalimantan sangat vital dalam mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di pulau tersebut. Ia menyampaikan bahwa tantangan di Kalimantan adalah mengejar ketertinggalan rasio Elektrifikasi Nasional yang saat ini telah mencapai 84,35%. Widyawan mengajak pemerintah daerah untuk meningkatkan akses listrik kepada masyarakat melalui energi baru terbarukan.

"Pembangunan infrastruktur energi di Kalimantan membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah," ungkapnya. "Tidak hanya untuk pembangkit listrik tapi juga untuk pembangunan jaringan listrik," tambahnya. Dengan dukungan tersebut akses listrik kepada daerah-daerah terpencil dapat ditingkatkan.

Rapat koordinasi ini menurut Agus merupakan hal positif untuk terus meningkatkan perekonomian di Kalimantan. Menurutnya Indonesia perlu memperkuat industrialisasi untuk menopang pertumbuhan ekonomi berbasis pada sumber daya alam yang tersedia di masing-masing daeraah. Selain Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga telah melakukan terobosan dengan memproses berbagai perizinan yang telah menjadi kewenangannnya. Agus menyampaikan pula bahwa sesuai arahan Presiden RI, seluruh fungsi hutan dapat dimanfaatkan sebagai infrastruktur energi. "Namun demikian hal ini membutuhkan dukungan pemerintah daerah untuk mempercepat proses penetapan peraturan daerah tentang RTRW" ungkapnya. (PSJ)

Percepat Pembangunan Ketenagalistrikan, PTSP di Daerah Perlu Dioptimalkan

Dirjen Ketenagalistrikan Jarman (kanan) menyampaikan PTSP perlu dioptimalkan di daerah.

Untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan ketenagalistrikan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah. Untuk itu koordinasi antara PTSP Pusat dan Daerah harus selalu dilakukan. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman saat *Focus Group Discussion* (FGD) antara Bank Indonesia, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah se-Kalimantan yang dilaksanakan di Balikapapan, Selasa (11/8). Menurut Jarman, masih banyak perizinan di daerah yang belum didelegasian Kepala Daerah kepada PTSP Daerah. Dengan PTSP di daerah, perizinan untuk membangun pembangkit dan jaringan transmisi dan distribusi listrik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dapat lebih cepat.

Jarman menyampaikan, saat ini perizinan ketenagalistrikan telah disederhanakan dari 52 izin menjadi 29 izin dan waktu pengurusannya dari 923 hari menjadi 256 hari. Namun menurutnya diperlukan pemantauan terkait implementasi dari penyederhanaan tersebut. Hal tersebut juga disampaikan Kepala Unit Pengendali Kinerja (UPK) Kementerian ESDM Widyawan dalam rapat koordinasi dengan Direktur BI, Menteri Keuangan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pemerintah Daerah se-Kalimantan yang dilaksanakan sebelum FGD.

Sejak awal tahun 2015, Kementerian ESDM telah mendelegasikan perizinan ketenagalistrikan (termasuk EBT), diantaranya izin operasi, izin panas bumi, penugasan survei pendahuluan panas bumi, penetapan wilayah usaha, dan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik. Berdasarkan data dari Tim PTSP Kementerian ESDM di BKPM, perizinan yang telah diterbitkan sejak *soft launching* di PTSP Pusat yaitu tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2015 adalah sebanyak 202 Izin Usaha Ketenagalistrikan.

Beberapa hal terkait PTSP Ketenagalistrikan yang harus diketahui oleh pemda antara lain bahwa perizinan di PTSP akan lebih cepat dilayani jika dokumen sudah lengkap, sedangkan untuk memperoleh dokumen terkait dengan perizinan di daerah. Selain itu saat ini sistem online PTSP belum bisa diterapkan semuanya, karena terdapat beberapa aplikasi yang belum bisa diterapkan di daerah.

Saat ini perizinan ketenagalistrikan telah disederhanakan dari 52 izin menjadi 29 izin dan waktu pengurusannya dari 923 hari menjadi 256 hari.

Jarman menyampaikan bahwa perlu adanya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur perizinan di Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/ Kota). "Perlu juga upaya integrasi perizinan PTSP Pusat dengan PTSP Daerah termasuk penerapan standar yang sama dalam pelayanan," ungkapnya. (PSJ)

Resensi Buku

Etika Lingkungan Hidup

Oleh: Dina Andriani/Pustakawan Muda

Judul buku : Etika Lingkungan Hidup
Penulis : A. Sonny Keraf
Penerbit : Kompas, 2010
Tebal : xv + 408 hlm.

Lingkungan hidup merupakan tanggung jawab semua penduduk di bumi ini. Berbagai kasus pencemaran dan kerusakan laut, hutan, atmosfer, air, tanah, terus bertambah. Ini merupakan perilaku manusia tidak bertanggung jawab. Manusia adalah penyebab utama kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Pada dasarnya lingkungan hidup bukan semata soal teknis, tetapi praktiknya perlu didasari etika dan moralitas untuk mengatasinya. Buku ini membeberkan persoalan etika lingkungan hidup, termasuk membahas konsep antroposentrisme, biosentrisme, ekosentrisme, hak asasi alam, termasuk kaitannya dengan kearifan tradisional dalam mengelola lingkungan hidup.

Buku ini sudah dicetak ulang sebanyak tiga kali untuk edisi ke-4. Selain revisi teknis , edisi baru ini juga memuat sebuah bab baru tentang Undang-Undang No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tidak bisa disangkal bahwa berbagai kasus lingkungan hidup yang terjadi sekarang ini, baik pada lingkup global maupun lingkup nasional, sebagian besar bersumber dari perilaku manusia. Kasus-kasus pencemaran dan kerusakan, seperti di laut, hutan, atmosfer, air, tanah, dan seterusnya bersumber pada perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, tidak peduli dan hanya mementingkan diri sendiri. Manusia adalah penyebab utama dari kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Menurut Arne Naess - filsuf asal Norwegia - krisis lingkungan hidup dewasa ini hanya bisa diatasi dengan melakukan perubahan cara pandang dan mengelola lingkungan hidup kita. Untuk itu, diperlukan sebuah instrumen hukum yang mewajibkan dan mengatur bagaimana caranya mengimplementasikan paradigma pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS), Amdal, izin lingkungan, sampai pada pengawasan dan penegakan hukum yang jauh lebih ketat.

Dengan demikian diharapkan etika lingkungan hidup tidak lagi sekadar berhenti menjadi perbincangan teoritis dan normatif melainkan dapat menjiwai dan terimplementasi secara konkret karena didukung oleh sanksi hukum sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 32/2009.

Ditjen Ketenagalistrikan Gelar Upacara HUT ke-70 Republik Indonesia

Pegawai Ditjen Ketenagalistrikan (DJK) mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-70 Republik Indonesia (RI) pada Senin (17/8). Sejak pukul 07.30 pagi, halaman parkir DJK sudah dipenuhi seluruh pegawai yang menggunakan seragam putih biru dan berkumpul untuk mulai membentuk barisan upacara. Para pejabat eselon, pengurus Dharma Wanita Persatuan DJK, serta segenap pegawai di lingkungan DJK yang turut hadir mengikuti upacara dengan khidmat.

Pukul 08.00 pagi upacara dimulai dengan dipimpin oleh Riski Cahya dari Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan. Pengibaran Bendera Sang Merah Putih dilaksanakan dengan penuh penghormatan, untuk menghargai jasa para pahlawan yang telah mempersembahkan kemerdekaan bagi Indonesia. Setelah pengibaran bendera, acara selanjutnya adalah pembacaan naskah Pancasila, UUD 1945 dilanjut dengan pembacaan naskah Proklamasi.

Pembina upacara adalah Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alihuddin Sitompul yang menyampaikan sambutan dari Dirjen Ketenagalistrikan Jarman. Upacara peringatan kemerdekaan ke-70 Republik Indonesia ditutup dengan pembacaan doa. Setelah pembacaan doa seluruh peserta membubarkan barisan untuk dilanjut dengan kegiatan ramah tamah. (UH)

Keceriaan DJK Sambut HUT Ke-70 RI

KITA BUTUH
LISTRIK
'SUBDIT LISDES'

DIRGAHAYU
REPUBLIK
INDONESIA KE 70
WUJUDKAN
INDONESIA
BERDAULAT
ENERGI!!

KEEP
CALM
and
SAVE
ELECTRICITY
PANGKAS
LISTRIK
Save Today.
Survive Tomorrow.

KEEP
CALM
and
SAVE
ELECTRICITY

Memahami Tagihan Listrik Prabayar

Oleh: Ahmad Amiruddin

Agar tak salah paham dengan banyaknya kesimpangsiuran info mengenai mafia token PLN, sebaiknya kita memahami bagaimana mekanime pemakaian listrik prabayar. Listrik prabayar ini dikembangkan PLN dalam 5 tahun terakhir. Jumlah pelanggan prabayar sudah mencapai 20.29 juta pelanggan dari total 58 juta pelanggan. Namun pertumbuhan jumlah pelanggan prabayar belum diimbangi dengan pemahaman mengenai bagaimana tagihan listrik ini.

pulsa akan dipotong Rp. 308 per 12 detik dan ada tarif lain setelahnya, anda pakai data lain lagi hitungannya. Dan anda bisa mengecek sisa pulsa anda dalam bentuk uang ini.

Kalo di PLN lain lagi, anda beli pulsa token Rp.100.000, maka nilai uang anda akan dikonversi menjadi nilai energi yang bisa anda gunakan satuannya kilo watt hour atau disingkat kWh. Kalau anda berlangganan 1300 VA (ini ditandai dengan

Sampai saat ini masih banyak salah kaprah mengenai sistem pembayaran listrik prabayar. Gambar di atas adalah simulasi untuk menjelaskan hal tersebut.

Kesalahpahaman terbesar adalah menyamakan antara pulsa token listrik dengan pulsa telpon prabayar. Pulsa telpon macam Simpati dinilai berdasarkan uangnya, operatorlah yang menkonversi duit ini berdasarkan jenis layanan yang anda pakai. Kalau anda pakai sms, harganya misalnya Rp.100, telepon ke sesama telkomsel misalnya maka

Pembatas di rumah anda adalah 6 Ampere) maka harga setiap kWh yang anda beli adalah Rp. 1352 untuk saat ini. Sebelum dikonversi menjadi nilai energi, maka nilai uang, yang anda bayarkan itu akan dipotong administrasi bank, uang ini tidak masuk ke PLN, akan tetapi masuk ke bank yang menyediakan fasilitas ATM atau internet banking,

nilainya bervariasi tergantung banknya, bisa biasanya mulai dari Rp1500 s.d Rp.000.

Selanjutnya, nilai sisanya dikurangi lagi dengan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU). PPJU ini adalah sumber penghasilan asli daerah yang pemungutannya dibantu oleh PLN dengan memotong langsung pembayaran dari masyarakat. Dulu PLN bisa mendapatkan upah pungut dari PPJU ini, tapi sekarang upah pungut tidak ada lagi, jadi murni uang PPJU ini hanya numpang lewat di rekening PLN dan disetorkan ke pemerintah daerah setempat.

Besarnya PPJU ini variatif, namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, besarnya Pajak Penerangan Jalan Umum adalah maksimal 10%. Adapun besaran pastinya ditentukan oleh Peraturan Daerah masing-masing, misalnya berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta tarif pajak untuk listrik yang digunakan atau dikonsumsi selain industri, pertambangan, minyak bumi dan gas alam adalah 2.4%.

Untuk memudahkan simulasi, saya membeli pulsa token Rp100.000 untuk rumah saya dengan daya berlangganan 1.300 VA yang saya beli melalui Internet Banking Mandiri seperti dibawah ini :
Kalau saya membeli listrik prabayar melalui fasilitas internet banking, maka dari Rp100 ribu yang saya gunakan, pertama-tama akan dipotong biaya administrasi bank sebesar Rp3.500. Saya sudah pernah protes sama teman yang kerja di bank mengenai hal ini, dan dia bilang, bank perlu investasi jaringan, SDM dan teknologi, jadi dia harus meminta *fee* dari orang yang menggunakan fasilitas ini. Nah dari Rp100 ribu itu sekarang tinggal Rp96.500. Dari Rp96.500, dipotong Pajak Penerangan Jalan Umum sebesar 2.4% dari pembelian listrik, nah hitung-hitungannya Total Pembelian Listrik adalah Rp94.238 dan pajaknya sebesar Rp2.262.

Kemudian, nilai uang yang Rp94.238 ini akan dikonversi menjadi nilai energi yang bisa dipakai harganya tergantung dari daya berlangganan sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2014, tarif listrik untuk daya berlangganan 1300 VA adalah Rp.1.352 /kWh, tarif ini belum mengalami *adjustment* sehingga masih sama dengan tarif pada peraturan tersebut. Sehingga, besarnya energi yang bisa dibeli adalah Rp. 94.238/Rp. 1352 = 69.706 kWH atau dibulatkan menjadi 69.8 kWH.

Besarnya energi ini yang akan tampil di kWH meter prabayar pelanggan saat anda memasukkan 20 digit token. Banyak yang salah paham bahwa yang tampil di kWh meter adalah nilai uang, padahal yang tampil adalah nilai energi.

Sekarang pertanyaannya kenapa yang tampil adalah kWh meter. Alasan pertama, yang dijual PLN adalah energi, bukannya uang. Sebagai analogi, anda membeli bensin, yang anda dapat adalah bensin dalam ukuran liter, bukan uang, dan yang tampil di meter anda di mobil adalah takaran bensin di tangki anda, meskipun di pompa bensin juga tampil berapa rupiah yang anda beli untuk mendapatkan sekian liter bensin. Anda beli bensin 100 ribu, anda akan mendapatkan bensin sekian liter, dan itulah yang terjadi dengan jual beli listrik, anda beli listrik 100 ribu maka anda akan mendapatkan strom sekian kWh.

Kenapa telpon bisa menampilkan uang? Karena konversi uang anda sangat tergantung dari layanan yang anda gunakan; apakah anda pakai SMS, telpon atau data. Bisa saja uang itu langsung dikonversi oleh provider menjadi sms, telpon atau data, tapi kurang flexible bagi anda dan kurang menarik jualannya tentunya.

Sementara kalau anda pelanggan prabayar yang anda beli hanya strom/energi, dan sifat layanannya tunggal dengan harga tunggal (untuk kwh meter anda). Alasan kedua kenapa yang tampil adalah energi adalah untuk memudahkan sistem PLN ketika ada perubahan tarif, sehingga yang harus diubah hanyalah database PLN dan tidak perlu melakukan perubahan pada kWh meter dikarenakan sebagian besar kWh meter PLN tidak terkoneksi secara online dengan server PLN.

Salam Strom.

PLTSa Bantar Gebang, Mengubah Sampah Menjadi Listrik

Sampah dari Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang dapat diubah menjadi listrik oleh PT Godang Tua Jaya. Perusahaan ini memenangkan lelang untuk pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang pada Desember 2008 lalu.

Menurut pihak perusahaan, mereka bisa memenangkan lelang tersebut karena ide mereka untuk mengolah sampah menjadi listrik. Pemprov DKI memberikan syarat kepada peserta lelang untuk memberikan ide terbaiknya dalam pengembangan pengelolaan sampah agar menjadi sesuatu yang berarti dan menghasilkan keuntungan.

PT Godang Tua Jaya membangun PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) Bantar Gebang pada tahun 2009. PLTSa Bantar Gebang Bekasi ini merupakan pembangkit listrik tenaga sampah kedua di Indonesia setelah di Bali.

Proses untuk mengubah sampah menjadi listrik cukup panjang. Sampah yang masuk sekitar 5.500 ton per hari ditumpuk di zona aktif menggunakan pola *clean development mechanism* (CDM) atau ramah lingkungan. Sampah-sampah itu dipilah dan didaur ulang. Selanjutnya sampah tersebut ditutup menggunakan membran rakrasa yang diberi sirkulasi air agar proses fermentasi menghasilkan gas. Penumpukan merupakan tahap biologis perubahan bahan organik menjadi senyawa seperti gas metana, karbon monoksida, hidrogen, dan senyawa lainnya.

Sumur yang berada di dalam tumpukan sampah berfungsi menangkap partikel gas agar tidak menguap ke udara bebas. Gas metana yang dihasilkan dilihat kualitasnya menggunakan alat ukur lalu dipanaskan di dalam suhu 40 derajat celsius. Gas metana itulah yang menjadi bahan bakar pembentuk energi listrik. Potensi biogas penghasil listrik di TPST Bantar Gebang cukup besar. Dari total seluruh sampah yang masuk, sebesar 70% merupakan sampah organik atau sumber utama biogas.

JO Operation dibawah PT Godang Tua Jaya baru memulai bisnis listrik secara komersil untuk dijual ke PT PLN (Perusahaan Litrik Negara) pada bulan November 2010. Menginjak tahun 2012 penjualan listrik dari JO Operation sudah mencapai di angka 10 Mega Watt per hari. Perusahaan

Sampah di Bantar Gebang mencapai 5.500 ton per hari.

Suasana di Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Bantar Gebang, Bekasi. Tahun 2012, penjualan listrik dari JO Operation mencapai 10 MW per harinya.

menargetkan untuk kapasitas listrik bisa mencapai 26 Mega Watt ke depannya.

Saat ini target tersebut belum bisa tercapai karena pengiriman sampah seringkali melebihi volume yang seharusnya sehingga sampah di TPST *overload* dan perusahaan kewalahan untuk mengaturnya. Selain mengolah sampah menjadi listrik, perusahaan juga mengolah sampah menjadi pupuk kompos dan mendaur ulang plastik.

Tujuan dari JO Operation ialah mengkonversi sampah menjadi bahan yang berguna secara efisien dan ekonomis dengan dampak lingkungan yang minimal. Pemanfaatan PLTSa juga merupakan upaya penghematan BBM yang dilakukan PLN. Dengan pemanfaatan sampah sebagai energi pembangkit listrik, maka penggunaan BBM sebagai tenaga pembangkit listrik dapat dihemat. Pemanfaatan sampah sebagai energi listrik diharapkan menjadi solusi persoalan sampah yang dialami oleh banyak daerah di Indonesia. (UH/AY)

Daftar Legislasi & Regulasi Terbaru Koleksi Perpustakaan DJK Bulan Januari - September 2015

oleh: Dina Andriani (Pustakawan Muda)

No.	Daftar Legislasi dan Regulasi Terbaru Koleksi Perpustakaan DJK
1	Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
2	Peraturan Menteri ESDM No. 01 Tahun 2015 Tentang Kerja Sama Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik
3	Peraturan Menteri ESDM No. 03 Tahun 2015 Tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik Dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Melalui Pemilihan Langsung dan Penunjukkan Langsung
4	Peraturan Menteri ESDM No. 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
5	Peraturan Menteri ESDM No. 10 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan Tahun Anggaran 2015
6	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah Untuk Penyaluran
7	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Air Dengan Kapasitas Sampai Dengan 10 MW (Sepuluh Megawatt) oleh PT Perusahaan Listrik Negara
8	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan
9	Keputusan Menteri ESDM No. 0074 K/21/MEM/2015 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2015 s.d 2024
10	Keputusan Menteri ESDM No. 0170 K/90/MEM/2015 tentang Pencabutan Keputusan Menteri ESDM No. 3106 K/90/MEM/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Kontrak Tahun Jamak Subsektor Ketenagalistrikan
11	Keputusan Menteri ESDM No. 0171 K/90/MEM/2015 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Penyelesaian Pembangunan Insfrastruktur Ketenagalistrikan yang Dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
12	Keputusan Menteri ESDM No. 0170 K/90/MEM/2015 tentang Pencabutan Keputusan Menteri ESDM No. 3106 K/90/MEM/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Kontrak Tahun Jamak Subsektor Ketenagalistrikan

Menteri ESDM Lantik Pejabat Administrator dan Pengawas

Ada yang berbeda di halaman Gedung Kementerian ESDM, Senin (22/6). Sejak pukul tiga sore, lebih dari tiga ratus orang berpakaian putih berdasi berbaris dengan rapi. Mereka adalah calon Pejabat Administrator (Eselon III) dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) yang akan dilantik oleh Menteri ESDM Sudirman Said. Pelantikan ini berbeda dengan biasanya karena baru kali ini pelantikan III dan IV oleh Menteri ESDM dengan jumlah yang sangat besar. Selain pejabat yang akan dilantik, hadir pula sebagai saksi pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian ESDM.

Sebelum dilantik, perwakilan pejabat yang akan dilantik ini membacakan pakta integritas yang isinya menunjukkan komitmen menjadi pejabat yang jujur, melayani, dan anti korupsi. Mereka juga berkomitmen untuk dievaluasi jika kinerja mereka tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Setelah membacakan sumpah, perwakilan pegawai menandatangani berita acara pelantikan. Diesty Koesoemo Wardhani dan Noor Khayati maju sebagai perwakilan Ditjen Ketenagalistrikan dengan disaksikan Dirjen Ketenagalistrikan Jarman.

Dalam sambutannya, Menteri ESDM menyampaikan bahwa pelantikan besar-besaran dalam sejarah Kementerian ESDM ini merupakan penutupan penyegaran organisasi yang dilakukan Kementerian ESDM.

"Ini sejarah bagi ESDM, tidak ada perombakan dan pelantikan sebanyak ini. Ada banyak proses yang akan kita benahi dan saya kira baik bagi kita semua termasuk saya, sekali-kali bergeser ke satu tempat untuk melihat dengan kacamata baru, punya teman baru, punya pekerjaan baru supaya kepala dan hati kita tertantang dengan tantangan-tantangan baru," ujar Sudirman.

Menurutnya tidak ada pembaharuan yang salah. "Selalu pembaharuan itu memberi manfaat, dalam waktu dekat anda akan merasakan bahwa *adjustment* ini sesuatu suatu yang tepat," ungkapnya.

Di lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan, Pejabat Eselon III yang dilantik berjumlah delapan orang, sedangkan Pejabat Eselon IV berjumlah 25 orang. (PSJ)

- ***Atas**-Pengambilan sumpah janji.*
- ***Tengah**-Diesty Koesoemo Wardhani dan Noor Khayati mewakili DJK untuk menandatangani berita acara pelantikan.*
- ***Bawah**-Para administrator dan pengawas DJK yang baru saja dilantik.*

Birokrasi Harus Punya Jiwa

Pelayanan Kementerian ESDM harus dilaksanakan dengan hati. Selama ini *public service* mendapat kritik berjalan seperti mesin menggunakan *Standard Operating Procedure* (SOP), sehingga nyawanya kurang hidup. Hal tersebut disampaikan Menteri ESDM saat melantik Pejabat Administrator dan Pengawas di halaman Gedung Kementerian ESDM, Senin (22/6). Menurut Sudirman, birokrasi harus punya jiwa, punya ruh.

Menurutnya sumpah yang disampaikan para pejabat yang baru dilantik bukanlah sekadar teks tapi janji dengan Tuhan. Selain itu Sudirman juga menyampaikan bahwa Pegawai Negeri harus selalu memiliki semangat pelayanan. Lagu Padamu Negeri yang dinyanyikan setelah pengambilan sumpah menurutnya adalah janji segala untuk mengorbankan apa yang kita punya untuk negara. Menurutnya tugas pemerintah ada dua yaitu tugas pelayanan dan tugas pembangunan. Ia mengajak semua karyawan untuk mensukseskan pembangunan di sektor ESDM.

Menteri juga menambahkan bahwa pelantikan Pejabat Eselon III dan IV dengan melantik pejabat baru dan merotasi sejumlah pejabat adalah bagian penutup konsolidasi organisasi yang telah ia jalankan sejak menjadi Menteri ESDM. Ia juga menyampaikan bahwa *camp leadership* atau pelatihan di lapangan untuk eselon 1-2 akan dipraktekkan kepada pejabat eselon 3-4 yang baru dilantik ini. Dengan pelatihan di lapangan, akan membawa semangat baru. "Sesekali refreshing bagus," ungkapnya.

Dari data Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian ESDM, Sudirman Said melantik 362 Pejabat Eselon III dan IV. Ini adalah pelantikan terbesar dalam sejarah Kementerian ESDM. Pejabat Eselon III yang mendapat promosi sebanyak 31 pegawai, mengalami rotasi internal 79 pegawai, mutasi antar unit 17 orang dan tetap pada posisinya sebanyak 76 pegawai dan yang dikosongkan saat ini 4 posisi.

Ada 9 Pejabat Eselon III yang diberhentikan dari jabatannya sebagai keputusan dari Baperjakat. Sedangkan untuk eselon IV, yang diberhentikan dari jabatan karena masalah kinerja sebanyak 40 pegawai, dipromosikan ada 95 orang, mengalami rotasi internal 169 pegawai, mutasi antar unit 15 pegawai dan tetap pada posisinya 196 pegawai.

"Mudah2an pelantikan ini membuat organisasi makin kuat, solid, mampu memberi servis," ungkap Sudirman Said. Selamat dengan tugas baru. Selamat dengan tantangan baru. (PSJ)

Ada 362 pejabat eselon III dan IV yang dilantik oleh Menteri ESDM Sudirman Said.

Birokrasi Harus Cepat Tanpa Meninggalkan *Good Governance*

Salah satu sifat dari birokrasi adalah melayani. Dengan demikian, cara pandang pemerintah harus mengarah pada semangat melayani masyarakat. Untuk itu, tata kelola pemerintah harus cepat tanpa meninggalkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman saat menerima kunjungan tim Unit Pengelola Reformasi Birokrasi (UPRB) Kementerian ESDM, di kantornya Selasa (7/7).

Tim dipimpin oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian ESDM Yond Rizal, serta dihadiri sejumlah pejabat dari Tim UPRB. Dirjen Ketenagalistrikan sendiri didampingi Sekretaris Ditjen Ketenagalistrikan Sujatmiko.

Menurut Jarman, pemerintah memang mengharuskan birokrasi yang rapi. Namun hal tersebut tidak menghalangi pemerintah untuk bekerja dengan dengan cepat. Untuk itu Jarman berpendapat bahwa instansi pemerintah harus memanfaatkan teknologi informasi dalam melayanimasyarakat. "Sekarang kan sudah ada internet, kita manfaatkan itu contohnya untuk disposisi surat," ungkapnya.

Dengan adanya disposisi surat secara online, maka dimanapun pejabat berada, tugas-tugas kantor dapat disposisikan ke bawahan dengan baik. Hal tersebut mempercepat kerja tanpa meninggalkan tata kelola birokrasi yang baik. Jarman berbagi pengalaman ketika Ditjen Ketenagalistrikan mulai menggunakan disposisi surat secara online. Dengan disposisi surat secara online, ia dapat mendisposisikan tugas dan melakukan tracking surat dengan baik. "Kami harapkan bahwa dalam melakukan reformasi birokrasi, *good governance* tetap harus dipegang," pesannya kepada tim UPRB.

Dalam kesempatan tersebut Jarman juga berbagi pengalaman mengenai terobosan pengelolaan birokrasi di Ditjen Ketenagalistrikan. Sejak dua tahun trakhir, Ditjen Ketenagalistrikan telah melakukan pelayanan registrasi Sertifikat Laik Operasi (SLO) secara online melalui website www.slo.djk.esdm.go.id.

Tim UPRB Kementerian ESDM mengunjungi DJK pada Selasa (7/7).

Penandatanganan komitmen Reformasi Kementerian ESDM oleh Dirjen Ketenagalistrikan Jarman.

Dengan sistem online ini, menurutnya jika kelengkapan syarat-syarat registrasi SLO sudah lengkap, Dirjen dapat langsung menerbitkan registrasi di hari itu juga. "Kita rata-rata meregister SLO bisa 5.000 SLO setiap hari," terangnya.

Dirjen Ketenagalistrikan berharap disposisi surat secara online dan aplikasi pelayanan secara online lainnya dapat diimplementasikan dengan baik di Kementerian ESDM. Ia berharap tim UPRB dapat membuang prosedur-prosedur yang tidak perlu dan mempercepat proses tanpa meninggalkan peran pimpinan yang mengatur. Selain berdiskusi, tim UPRB juga meminta Dirjen Ketenagalistrikan untuk menandatangani komitmen Reformasi Kementerian ESDM. (PSJ)

Meriahnya Buka Puasa Bersama Ditjen Ketenagalistrikan, EBTKE, dan Minerba

Rabu (1/7), Ditjen Ketenagalistrikan mengelar acara buka puasa bersama di Auditorium Samaun Samadikun. Acara ini merupakan kegiatan rutin yang biasa dilaksanakan di Ditjen Ketenagalistrikan pada setiap Bulan Ramadhan. Namun ada yang berbeda pada buka puasa tahun ini. Kegiatan buka puasa bersama tidak hanya dihadiri oleh pejabat dan pegawai Ditjen Ketenagalistrikan saja, namun pejabat dan pegawai dari Ditjen EBTKE dan Ditjen Minerba juga hadir dalam buka puasa bersama tahun ini. Dengan tema 'Melalui Puasa Ramadhan Kita Raih Kemenangan sebagai Umat yang Berakhlakul Karimah', para pegawai tiga direktorat jenderal ingin lebih mempererat tali silaturahim yang selama ini terjalin.

Kyai Haji Munawir Asih menyampaikan ceramah tentang makna Ramadhan.

Setelah pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan Saritilawah, Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Munir Ahmad memberikan sambutan mewakili Direktur Jenderal Ketenagalistrikan. Munir menyampaikan tema kegiatan, tujuan kegiatan, dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang menyelenggarakan dan yang hadir pada kegiatan tersebut.

Selepas sambutan, acara dilanjutkan dengan ceramah yang disampaikan oleh Kyai Haji Munawir Aslih. Dalam ceramah tersebut Munawir menyampaikan bahwa bulan Ramadhan tidak hanya sebatas berpuasa, namun ada nuansa yang berbeda dari bulan Ramadhan yaitu nuansa rohani, sehingga mengakibatkan kedekatan kita kepada Allah SWT terasa nikmat.

"Nuansa rohani ini bisa menyelamatkan manusia dari berbagai macam perbuatan yang membuat manusia tidak memiliki akhlakul karimah," ungkapnya. Disela-sela ceramah, Dirjen Ketenagalistrikan Jarman hadir di kegiatan ini. Menjelang adzan Maghrib dan waktunya buka puasa bersama, Menteri ESDM Sudirman Said pun hadir dan bergabung untuk berbuka puasa bersama. Keramahtamahan seakan semakin terjalin erat dikarenakan Sudirman Said menyampaikan pesan bahwa Bulan Ramadhan ini adalah momentum yang baik untuk meningkatkan keimanan dan kinerja di sektor ESDM.

Menteri berbagi pengalamannya selama bekerja. Ia juga mengingatkan untuk bekerja dengan tekun, jujur dan penuh pengabdian kepada bangsa dan negara. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan shalat Maghrib berjamaah, makan malam bersama, dan shalat Isya serta shalat tarawih berjamaah. Sesuai dengan tema dan tujuan diadakannya kegiatan ini, semoga semakin erat tali silaturahim di antara pegawai KESDM. (MH)

Pemotongan Hewan Qurban Kementerian ESDM

Sebanyak tujuh ekor sapi dikurbankan pada Idul Adha tahun ini oleh Kementerian ESDM.

Kementerian ESDM hari ini (25/9) melakukan pemotongan hewan kurban di lapangan kantor Ditjen Ketenagalistrikan. Sebanyak tujuh ekor sapi dikurbankan pada Idul Adha tahun ini. Tujuh sapi tersebut berasal dari pegawai-pegawai di Kementerian ESDM.

Menteri ESDM Sudirman Said memberikan sambutan pembukaan pada acara penyembelihan hewan qurban ini. "Kita menyelenggarakan ibadah qurban sebagai bagian dari pelaksanaan ajaran agama kita, dan acara qurban ini juga merupakan rangkaian acara memperingati hari pertambangan dan energi yang akan jatuh pada hari Senin," ujar Menteri.

"Qurban adalah salah satu cara atau satu metode bagaimana kita peduli. Kemudian membagi apa yang kita punya kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan Insya Allah mudah-mudahan masyarakat Indonesia makin hari makin maju dengan segala tantangannya, hari ini kita menunaikan ibadah itu membagi kepada yang membutuhkan," ujar Sudirman Said sebelum menyerahkan hewan qurban kepada panitia.

Menteri Sudirman Said menambahkan bahwa pada Idul Adha tahun ini yang mesti disembelih adalah sifat kebinatangan, sifat keserakahan, sifat tidak tau tatakrama, dan sifat kesewenang-wenanganan kita.

"Itu bisa dijadikan refleksi bagi kita bagaimana ketulusan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang hanya loyal kepada perintah Allah. Perintah Tuhan mengorbankan dirinya, tapi ada pembelajaran lain bahwa apabila kita bisa menyingkirkan sifat-sifat kebinatangan kita untuk menjadi betul-betul manusia seutuhnya maka Insya Allah pekerjaan kita akan terjaga dari hal-hal yang tidak terpuji," tambah Menteri Sudirman Said.

Menteri Sudirman Said berterima kasih kepada semua pihak yang telah menyerahkan hewan qurban kepada panitia. Kemudian acara pemotongan hewan qurban dimulai dan dagingnya dibagikan kepada yang membutuhkan. (UH)

Daging sapi yang telah dipotong dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik untuk kemudian dibagikan kepada yang membutuhkan.

Berburu Beasiswa Belanda

Ketika tahun 2013 yang lalu saya mendapatkan beasiswa Netherlands Fellowship Programme (NFP) untuk melanjutkan studi master di Belanda, banyak orang yang bertanya tentang tips untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Lebih dari itu, rupanya banyak pula yang belum paham tentang beasiswa NFP. Tulisan ini saya buat untuk berbagi pengalaman saya mendapatkan beasiswa Belanda.

Belanda termasuk salah satu negara yang rajin memberikan beasiswa bagi orang Indonesia untuk melanjutkan studi atau mengikuti kursus singkat di Negeri Kincir Angin tersebut. *Studeren in Nederland* (StuNed) adalah beasiswa yang familiar bagi orang Indonesia, terutama di kalangan pegawai negeri sipil (PNS). Tak dapat dipungkiri, sebagai besar penerima beasiwa StuNed berasal dari instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. StuNed merupakan beasiswa yang dikhususkan oleh Pemerintah Belanda untuk orang Indonesia. Setiap tahunnya, ada sekitar 200 hingga 250 beasiswa StuNed yang ditawarkan untuk jenjang master, kursus singkat, dan *tailor made training*.

Selain StuNed, ada pula beasiswa *Netherlands Fellowship Programme* (NFP). StuNed dan NFP sama-sama memberikan beasiswa penuh. Artinya, seluruh biaya pendidikan, biaya perjalanan dari negara asal ke Belanda dan sebaliknya, hingga biaya hidup selama di Belanda ditanggung sepenuhnya oleh pemberi beasiswa. Menarik, bukan?

Jika StuNed khusus untuk orang Indonesia, NFP diperuntukkan bagi orang-orang dari 51 negara yang tersebar di Afrika, Amerika Latin, hingga Asia termasuk Indonesia. Dengan demikian, saingan untuk mendapatkan beasiswa NFP tidak hanya dari Indonesia saja. Kuota orang Indonesia yang diterima juga lebih sedikit dibanding StuNed.

Disamping itu, NFP memprioritaskan perempuan untuk menerima beasiswa, sehingga peluang perempuan untuk mendapatkan beasiswa NFP lebih besar ketimbang laki-laki. Selain kursus singkat dan master, NFP juga menyediakan beasiswa untuk program doktoral.

Berikut adalah tips untuk mendapatkan beasiswa StuNed/NFP Belanda:

1.Pelajari persyaratan beasiswa di www.nesoindonesia.or.id

Nuffic Neso Indonesia (atau lebih dikenal dengan Neso Indonesia) adalah pihak yang mempromosikan pendidikan tinggi Belanda di Indonesia. Neso Indonesia juga yang mengurus proses beasiswa StuNed. Melalui website ini, kita bisa mengetahui syarat umum yang harus dipenuhi untuk mendaftar beasiswa antara lain: memiliki pengalaman kerja minimal dua tahun, mendapatkan dukungan dari kantor, minimal skor internet-based test (iBT) TOEFL 79/ IELTS 6.0 dan memiliki motivasi yang kuat ditunjukkan melalui *motivation statement*.

Sementara pendaftaran StuNed masih dikelola oleh Neso Indonesia, sejak Agustus 2014, ada perubahan untuk mendaftar beasiswa NFP. Jika dulu kita harus daftar melalui Nuffic Belanda melalui sistem online, sekarang kita bisa langsung mendaftar di universitas pilihan.

2.Pilih jurusan dan universitas pilihan melalui www.studyfinder.nl

Dengan mengetahui jurusan dan universitas yang kita pilih, kita bisa langsung mengetahui persyaratan khusus agar diterima di universitas tersebut. Kalau sedari awal kita sudah menetapkan pilihan, hal itu tentunya membuat kita lebih fokus.

Namun bagaimana kalau kita masih bingung dengan jurusan dan kampus yang akan dipilih? Website www.studyfinder.nl sangat membantu kita untuk menemukan jurusan dan kampus

yang kita inginkan. Untuk mendaftar beasiswa StuNed atau NFP, kita diwajibkan melampirkan *unconditional acceptance letter* dari kampus. Peluang untuk mendapatkan beasiswa lebih besar jika kita sudah diterima oleh pihak universitas.

Syarat untuk masuk kampus pilihan terkadang (kalau tidak bisa dibilang selalu) lebih berat dibanding syarat untuk *apply* beasiswa. Sebagai gambaran, minimal skor iBT TOEFL kita untuk mendaftar beasiswa adalah 79. Akan tetapi, kampus seringkali mensyaratkan skor lebih dari itu agar kita diterima di jurusan pilihan. Sangat jarang ada kampus yang mensyaratkan skor di bawah itu sebagai standar minimalnya. Dengan demikian, jadikan skor minimal iBT TOEFL/IELTS kampus sebagai acuan.

3.Pilih program yang jadi prioritas pemberi beasiswa

Memilih program prioritas = peluang diterima lebih besar. Berikut adalah bidang-bidang prioritas sebagai bagian dari kerjasama bilateral Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda yang tercantum dalam *Multi Annual Policy Network*: Perdagangan Internasional, Keuangan dan Ekonomi (*International Trade, Finance and Economics*), Transportasi, (Agro) logistik dan Infrastruktur (*Transport*, (Agro) *logistics and Infrastructure*), Keamanan dan Penegakan Hukum (*Security and Rule of Law*), Air (*Water*), Agro-Pangan dan Hortikultura (*Agro-Food and Horticulture)*, Manajemen Kesehatan (*Health Management*).

Akan tetapi, tidak berarti yang ingin memilih jurusan di luar itu tidak memiliki peluang sama sekali. Perlu diingat bahwa sepanjang kita bisa memberikan argumen bahwa jurusan yang nantinya akan kita ambil dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan mendukung pekerjaan di kantor, pemberi beasiswa akan mempertimbangkannya. Dulu saya mengambil *Rural Development and Communication* dengan pertimbangan tersebut.

4.Pasang target untuk skor iBT TOEFL/IELTS

Setelah memastikan pilihan jurusan, kita tentunya sudah mengetahui skor minimal iBT TOEFL/IELTS yang harus dicapai. Kita harus berupaya untuk melampaui skor minimal tersebut. Saya dulu mempersiapkan diri dengan mengikuti kursus Bahasa Inggris selama tiga bulan dan belajar mandiri dengan membeli buku latihan soal iBT TOEFL.

Dulu saya mengambil iBT TOEFL sehingga saya lebih familiar dengan tes tersebut. Ada empat hal yang diujikan, yakni r*eading, listening, speaking*, dan *writing*. Dengan mempersiapkan diri lebih awal, kita bisa mengetahui kekurangan kita di bagian apa sehingga dapat memperbaikinya. Kita juga dapat mengetahui tipe soal yang biasanya diujikan.

5.Jadwalkan untuk mengikuti tes iBT TOEFL/IELTS

Pihak kampus biasanya mensyaratkan hasil tes iBT TOEFL dikirimkan langsung oleh penyelenggara iBT TOEFL ke kampus. Saya pernah punya pengalaman dengan kampus yang tidak mau memberikan u*nconditional acceptance letter* selama hasil tesnya tidak dikirim langsung oleh penyelenggara. Kira-kira butuh waktu dua minggu hingga sebulan untuk mengirimkan hasil tes itu. Dengan demikian, atur waktu dan jangan mepet dengan *deadline* beasiswa.

Setiap pelaksanaan tes mempunyai kuota maksimal untuk peserta tes. Saya biasa melihat di website www.ets.org/toefl untuk melihat jadwal yang tersedia. Biaya tesnya memang mahal, berkisar 190USD. Oleh karena itu, bijaklah dalam membuat persiapan. Selain untuk menghemat waktu, persiapan yang matang juga bisa menghemat uang.

6.Minta orang lain membaca *motivation statement* kita

Motivation statement adalah cerminan motivasi kita untuk mendapatkan beasiswa. Setiap orang memiliki motivasi yang unik dan personal. Oleh karena itu, jangan buat *motivation letter* yang umum dan *copy paste* dari internet.

Setelah membuat *motivation letter* (tentu dalam Bahasa Inggris), kita bisa meminta masukan orang lain yang kita percaya untuk memberikan pendapatnya. Selain dapat melihat kekurangan yang mungkin tak terlihat bagi kita seperti salah ketik dan lainnya, mereka juga dapat ikut mengoreksi *grammar* yang keliru.

Tips di atas hanyalah *sharing* pengalaman yang saya jalani saat mendaftar beasiswa. Selain NFP, saya juga dulu pernah mendaftar StuNed. Pada akhirnya, setelah semua persyaratan terpenuhi, kita bisa langsung mengirimkan semua dokumen yang dibutuhkan. Kirimkan dokumen ke Neso Indonesia untuk mendaftar beasiswa StuNed, dan kirim ke kampus yang bersangkutan untuk mendaftar beasiswa NFP. Tunggulah hingga akhirnya pengumuman. Selamat jika Anda mendapatkan beasiswa ke Belanda! Akan tetapi jika kehendak Anda belum tercapai, cobalah lagi dan lagi. Anda akan semakin terlatih dan siap. Semoga pada akhirnya, Negeri Tulip bisa menyambut Anda! (AMH/ anggita.miftah@gmail.com)

CEO GE Indonesia: "Hidup Itu Seperti Mendorong Mobil di Tanjakan"

oleh: Ahmad Amiruddin

"Saya bukan motivator!!!"

Begitulah DR Handry Satriago, CEO GE Indonesia, mengawali sesi satu jam acara One Hour University yang diselenggarakan Kementerian ESDM di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (29/9).

CEO GE Indonesia Handry Satriago membagikan pengalamannya dalam One Hour University Kementerian ESDM di Auditorium Samaun Samadiku, DJK (29/9).

Duduk di kursi roda ia memegang mic dan bergerak semeter dua meter ke kiri dan ke kanan. Para hadirin memperhatikan dengan seksama. Terpancar percaya diri, kedalaman ilmu dan optimisme dari tekanan suara dan senyumannya.

Handry mengawali sharingnya mengenai konsep kepemimpinan. Menurutnya, konsep leadership itu harus memperhatikan tiga hal yaitu *leader*, *follower,* dan situasi. Seorang pemimpin harus memperhatikan tiga unsur ini ketika memimpin. *Leader* yang sebelumnya sukses di satu organisasi belum tentu bisa langsung mengaplikasikan metodenya di organisasi lainnya. *Leader* harus memperhatikan unsur *follower* dan situasi. Situasi dan orang yang berbeda menjadikan langkah-langkah harus disesuaikan juga. *Leader* yang hanya terpaku pada dirinya sendiri disebut dengan *narcissistic leader*. Handry kemudian menceritakan kisah Narcissus; salah satu tokoh dalam mitologi yang Yunani yang tampan. Narcissus tenggelam di kolam karena mengagumi bayangannya sendiri. Seperti itu pula *narcissistic leadership.*

Handry lalu memperkenalkan tiga situasi yang menjadi tantangan para pemimpin saat ini:

1. UNCERTAINTY

Banyak perubahan mendasar yang kita alami dalam 15 tahun terakhir. Handphone yang dulunya sangat besar sekarang semakin kecil dan fungsional. Internet yang hadir telah mengubah dunia. Pesawat murah memungkinkan orang berpetualang ke banyak negara. Yang paling fenomenal adalah Media Sosial. Facebook telah mengubah tingkah laku orang. Dengan Facebook semua orang punya banyak teman yang belum tentu sebanyak itu dunia nyata.

Yang menarik adalah perubahan-perubahan ini tidak pernah terpikirkan 15 tahun sebelumnya. Dunia berada pada masa ketidakpastian. Setahun lalu di sebuah pertemuan antar CEO di Amerika tidak pernah ada yang memprediksi kalau tahun ini minyak dunia bisa dibawah 100 USD, jangankan memprediksi, membicarakanpun tidak.

Tantangan bagi kita adalah *how to deliver in this uncertain world.* Untuk menghadapi dunia yang tak menentu maka kita perlu *adaptive* dan *flexible*, dua kunci ini yang menjadikan kita tetap bertahan. Sekarang tak bisa lagi sebuah perusahaan menjadikan *core value*-nya adalah *change* karena perubahan itu sifatnya terus menerus. *Change* harus menjadi DNA setiap orang.

2. GLOBAL WORLD

Bukan hanya tujuh ratus ribu tenaga kerja China yang jadi masalah sekarang ini. Tapi lebih dari itu, karena dunia sudah terhubung menjadi satu. Kalau dulu ada 197 kapal (*melambangkan negara*) berlayar ke arah yang berbeda-beda, maka sekarang ini hanya ada satu kapal dengan 197 kabin di dalamnya berlayar di lautan yang tak menentu gelombangnya. Krisis yang terjadi di Yunani bisa berdampak ke siapa saja. Bahkan Eropa turut krisis, pengangguran di Spanyol meningkat jadi 25%. Karena Eropa krisis maka China menahan produksinya, karena produksi menurun, maka permintaan batu bara menurun, dan efeknya sampai ke ekspor batubara Indonesia.

Krisis nilai mata uang juga terjadi di seluruh dunia, karena China mendevaluasi yuan, rupiah pun jatuh. Kita berlayar dalam satu kapal dengan 197 kabin tanpa kapten dan berlayar di laut yang bergolak. Untuk bisa bertahan, harus punya daya saing global dan siap belajar sama siapa saja dan siap berkolaborasi. Negara-negara yang hanya mengandalkan komoditi akan menjadi obyek santapan negara-negara lainnya.

3. ABAD IDE

Setiap tahun *World Economic Forum* membuat peringkat daya saing negara-negara di dunia. Indonesia berada di urutan ke-35. Cukup baikkah peringkat ini? Bolehlah dibilang peringkat kita baik jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Mali, Zimbabwe atau negara-negara Afrika. Tapi jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita seperti Singapura kita kalah jauh. Singapura urutan ke-4 dunia, Malaysia juga lebih baik. Peringkat daya saing ini tak menjadi masalah seandainya tidak ada korelasi antara peringkat daya saing dengan hal lainnya. Ternyata peringkat daya saing terkait erat dengan kemakmuran. Semakin tinggi daya saing suatu bangsa maka akan semakin tinggi tingkat kemakmurannya.

Penentu daya saing bukanlah sumber daya alam, karena banyak negara berdaya saing kuat tidak memiliki sumber daya alam yang mencukupi, misalnya Singapura dan Jepang. Ataukah karena jumlah penduduknya sedikit? Tidak juga, ada negara berpenduduk sedikit yang daya saingnya rendah dan ada negara berpenduduk banyak yang daya saingnya tinggi.

Negara yang berada di peringkat satu adalah Swiss. Negara ini sangat kecil. Apa produk yang banyak dari Swiss? Beberapa di antaranya adalah coklat, padahal Swiss tidak menghasilkan kakao. Tapi coklat dibeli murah dari kita dan dijual lagi dengan harga mahal ke seluruh dunia.

Produk Swiss lainnya adalah jam tangan. Kalau anda ke Swiss, masuklah ke sebuah toko jam, bilang *"I am from Indonesia, I am looking for a good watch".* Maka pelayan toko akan membawa nampan berisi jam-jam dengan paling banyak fitur. Harganya 1 s.d 25 juta rupiah. Yang pertama mereka jual adalah fiturnya, bisa bermacam-macam fungsinya. Kalau anda tak terlalu suka, anda bisa minta yang lebih baik, maka mereka akan memberikan jam berdasarkan merknya, misalnya jam tangan Rolex.

Pada tahap ini mereka menjual merk. Tapi kalau anda tak suka juga, maka anda akan dibawa ke sebuah ruangan, dari bawah akan muncul jam tangan yang disorot lampu. Jam tangan ini diperkenalkan sebagai jam tangan yang hanya dijual 3 di dunia, salah satunya mungkin tenggelam di Samudera Atlantik, satunya sudah dibeli oleh seorang Raja dan hanya satu itu yang tersisa. Harganya bisa 5 miliar rupiah, padahal fungsinya hanya untuk melihat waktu. Yang dijual bukan hanya fungsi, yang dijual adalah kelangkaan (*scarcity*). Negara sekecil Swiss ini bisa menghasilkan *value* karena adanya ide-ide.

Anda peminat kopi? Kopi terenak ada di daerah perbatasan Sumatera Utara-Aceh, harganya hanya Rp3.000 dengan pelayanan yang maksimal. Sementara itu, sebuah gerai kopi tingkat dunia bisa menjual milyaran gelas per hari

Peserta One Hour University Kementerian ESDM menyimak kisah Handry Satriago yang inspiratif.

dengan harga paling murah Rp38.000 dengan pelayanan tak seistimewa kedai kopi di Sumatera Utara. Handry mengatakan yang dijual oleh gerai kopi tingkat dunia itu adalah *experience* atau pengalaman. Ada kebanggaan tersendiri ketika bisa minum kopi dari sana.

Di General Electric Indonesia, Handry menuturkan, ia heran sendiri kenapa setelah 70 tahun baru ada orang Indonesia. Padalah ia melihat banyak orang yang lebih hebat dirinya. Suatu saat ia menanyakan hal ini kepada orang GE Global, ternyata jawabannya cukup mengejutkan.

"Kalian di Indonesia selalu mampu mencapai target, apapun program dari kami di Amerika kalian selalu menjawab iya, tidak pernah bilang tidak, dan di situlah permasalahannya. Tak ada umpan balik. Orang-orang yang selalu bilang *yes* tidak mampu menghasilkan ide," demikian tutur orang GE Global tersebut.

Leader harus punya ide. Untuk bisa berlayar di abad ide ini tiga kemampuan yang harus dimiliki, yaitu:

1)**Punya ide.** Untuk punya ide kuncinya adalah pertanyaan. Mulailah dengan bertanya ***Why?*** setelah itu ***Why Not?***

2)**Berani menyampaikan ide.** Budaya menyampaikan pendapat itu penting.Di organisasi manapun baik di pemerintahan atau swasta budaya mengemukakan pendapat itu tidak boleh dikekang, tentu menyesuaikan dengan kultur setempat, dengan cara-cara yang sopan. Kita harus belajar *elevator speech* atau menyampaikan pendapat dalam waktu yang singkat dan padat, karena tidak selalu ada kesempatan untuk bertemu *decision maker.*

3)**Daya tahan.** Seorang pemimpin harus berani memperjuangkan idenya, dan itulah yang menjadi kesamaan para pemimpin kelas dunia. Terkait dengan ide ini, kita tak perlu berkecil hati. Orang Indonesia bisa menghasilkan ide dan menyaingi orang luar, bahkan meskipun Bahasa Inggrisnya tidak bagus. Tahun lalu General Electric menyelenggarakan sayembara desain *bracket* mesin pesawat. Semakin ringan *bracket* maka akan semakin banyak *saving*-nya.

Lebih dari seribu *engineer* dari seluruh dunia. Juara 3 adalah lulusan Oxford, juara dua PhD asal Swedia dan juara pertama adalah lulusan SMK asal Salatiga, bernama Ardian Fuadi dan Arie Kurniawan, keduanya kakak beradik. Kunci kemenangannya adalah karena mereka tak pernah berhenti belajar dan mendesain. Kedua kakak beradik ini juga menjadi desainer *aerodynamic* beberapa kendaraan di dunia. Yang mereka jual adalah ide. Bahasa Inggrisnya tak terlalu bagus tak menjadi penghalang.

Mengakhiri sesinya, Handry kemudian bercerita mengenai masa mudanya:

"Saya memakai kursi roda pada usia 17 tahun. Saya ingat terakhir kali berdiri dengan kedua kaki pada saat shalat ashar di suatu sore. Sebelum-sebelumnya saya adalah seorang pencinta alam yang biasa naik gunung dan juga pemain teater. Pada saat rakaat terakhir, tiba-tiba punggung saya seperti retak dan saya tak sadarkan diri. Ketika sadar, dunia saya telah berubah, saya tak bisa menggerakkan kaki lagi.

Saya mengunci kamar berminggu-minggu tak mau keluar kamar. Setelah 3 minggu bapak saya masuk mendobrak pintu. Sambil membuka Jendela beliau berkata, "Nak dunia ini adalah pilihan-pilihan, kamu punya dua pilihan, pertama kamu boleh terus menerus berada di kamar ini, dan kami sebagai orang tua akan berusaha semampunya untuk membuat kamu nyaman. Atau kamu bisa memilih yang kedua, kamu keluar dari kamar ini, tapi jangan berharap duniamu akan sama seperti dulu lagi, teman-temanmu yang biasa naik gunung atau main teater tak akan datang lagi mengajakmu, tapi mungkin dengan begitu akan terbuka peluang berikutnya." Setelah itu, keesokan harinya saya langsung keluar kamar dan memanggil taksi dan langsung ke sekolah.

Hidup ini seperti mendorong mobil di tanjakan, kita tak boleh berhenti, kalau tidak mobilnya bisa mundur. Bagi saya, sejak peristiwa itu, semuanya menjadi tidak mudah. Bangun tidur, bagi sebagian orang hanyalah persoalan membuka mata saja, tapi bagi saya kesulitan sudah dimulai sejak bangun tidur. Bagaimana saya harus turun dari tempat tidur, bagaimana saya bisa buang air di toilet, semuanya berubah. Tapi saya harus terus bergerak. Kalau saya tidak bergerak dan mendorong mobil kehidupan saya dan berhenti 30 tahun lalu, maka mungkin saya tidak bisa melihat keindahan Lombok, Bali, Houston, Australia, Swiss bahkan mungkin tak bisa masuk ke ruangan ini. Karena itu, jangan pernah berhenti, teruslah mendorong mobil anda!!"

Gubernur Papua Barat Membuka Roadshow Pameran dan Seminar Hari Nusantara Ke-15

Gubernur Papua Barat Abraham O Atuturi mewakili Menteri ESDM selaku Ketua Harian Hari Nusantara ke-15, Senin (10/8) memukul tifa sebanyak lima kali menandai dibukanya rangkaian Road Show Pameran dan Seminar Hari Nusantara ke-15 di Gedung Pasca Sarjana Universitas Papua (Unipa) di Manokwari. Rangkaian Pameran dan seminar dalam rangka Hari Nusantara ke-15 akan diadakan di 9 perguruan tinggi yang di mulai dari Universitas Papua di Manokwari dan diakhiri di Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh dihadiri juga oleh Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Mochtar Husein, Kepala Badan Litbang Kementerian ESDM F.X. Sutijastoto, Rektor Unipa Suriel S. Mofu dan perwakilan dari pemangku kepentingan sektor ESDM.

Dalam sambutannya Abraham mengatakan bahwa Papua Barat memiliki potensi sumber energi dan daya mineral yang cukup besar dan menjadi kebanggan bagi Indonesia seperti batubara, emas, nikel, panas bumi, tenaga air, minyak dan gas yang telah memberikan kontribusi bagi pendapatan negara. Gubernur Papua Barat juga menyatakan bersedia menyiapkan 21 hektar tanah yang akan di gunakan untuk pembangunan PLTS 3 MW yang akan dibangun oleh Kementerian ESDM.

Hal ini dikarenakan bahwa kelistrikan di Papua Barat masih menjadi problem yang mendesak bagi kehidupan masyarakat, pemerintah daerah maupun membangunan di tanah papua. Diharapkan ada kesinambungan antara pemerintah pusat dan daerah untuk membangun masa depan masyarakat Papua khususnya Papua Barat. Hal ini juga di sampaikan pada bagian akhir sambutan Rektor Unipa Suriel S. Mofu selaku tuan rumah bahwa "dimulai dari Papua Indonesia akan maju".

Menteri ESDM dalam sambutannya yang dibacakan oleh Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Mochtar Husein mengatakan, "Dalam rangka pelaksanaan Hari Nusantara tahun 2015 ini dimana kegiatan puncaknya akan diadakan di Banda Aceh pada tanggal 13 Desemeber 2015, serangkaian kegiatan akan dilaksanakan untuk mendengungkan kegiatan ini secara nasional yang diawali dengan peluncuran Hari Nusantara pada tanggal 1 Juli 2015 di Kota Cirebon."

Salah satu kegiatan untuk mengenalkan Hari Nusantara adalah Pameran dan Seminar yang diawali di Unipa Manokwari yang mengambil tema "Potensi ESDM dan pengembangannya untuk pembangunan kawasan Papua dan Papua Barat" dan akan berakhir di Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh pada tanggal 10 Desember 2015.

"Hari Nusantara yang kita peringati setiap tahun berasal dari Deklarasi Djuanda yg dicetuskan pada 13 desember 1957 oleh Perdana Menteri Djuanda Karjawijaya. Deklarasi Juanda tersebut mengatakan dan mempertegaskan kepada dunia bahwa laut Indonesia di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu Kesatuan wilayah NKRI," ujarnya.

Mochtar Husein mengharapkan agar pembahasan dalam seminar ini dapat mencakup aspek rencana pengembangan infrastruktur energi di wilayah Papua, baik Provinsi Papua Barat ataupun Papua dan juga dapat mencakup rencana pembangunan ekonomi dan infrastruktur, di samping arah kebijakan pembangunan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Di akhir sambutannya ia menyampaikan bahwa kegiatan seminar di Papua Barat ini agar diteruskan di wilayah-wilayah lain sebagai rangkaian Peringatan Hari Nusantara 2015, sehingga kita benar-benar bisa menangkap aspirasi daerah-daerah dan memotret potensinya. Dengan demikian, melalui momentum Hari Nusantara kita dapat mewujudkan tema peringatan Hari Nusantara 2015 yaitu "Kekayaan Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Pembangunan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia Guna Mewujudkan Kejayaan dan Kemakmuran Bangsa". (JFN)

Menteri ESDM Hadiri Halal bi Halal di DJK

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menghadiri acara halal bi halal bersama pegawai Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) dan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM serta para *stakeholder* di Auditorium Samaun Samadikun, Gedung DJK hari ini (28/7).

Dirjen Ketenagalistrikan Jarman menyampaikan bahwa halal bi halal merupakan kegiatan rutin tahunan di DJK, namun biasanya bersifat internal di lingkungan DJK saja. Untuk tahun ini, halal bi halal diadakan dengan mengundang *stakeholder* sektor ketenagalistrikan dan pertama kalinya dihadiri oleh Menteri ESDM. Jarman menyampaikan terima kasih pada Menteri ESDM dan *stakeholder* yang telah hadir pada acara tersebut. Ia mengharapkan acara ini dapat menjadi ajang untuk bermaafan sekaligus mempererat hubungan dengan stakeholder.

Mengawali sambutannya, Menteri ESDM Sudirman Said mengajak segenap pegawai untuk bersyukur karena sudah bisa memulai rutinitas kembali bekerja dengan kecepatan penuh setelah menjalani ibadah Ramadhan sebulan. "Mohon maaf lahir batin atas nama pemerintah, atas nama Kementerian ESDM, semoga ibadah puasa kita diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan menjadi proses pembelajaran batin sehingga bisa memperkuat diri kita," ujar Menteri.

Sudirman kemudian menceritakan bahwa beberapa minggu ini ia telah menghadiri berbagai pertemuan serta pergi ke beberapa negara – termasuk ke Amerika Serikat dan Iran. Dalam berbagai pertemuan tersebut, pembahasan mengenai listrik 35.000 MW selalu mengemuka. Sudirman mengatakan bahwa respon yang diterima adalah positif meski masih ada sedikit keraguan.

Lebih jauh lagi, dari pertemuan-pertemuan tersebut Sudirman menangkap pesan bahwa Indonesia diharapkan oleh dunia untuk menjadi negara yang kuat, tidak saja dari segi ekonomi, namun juga politik, sosial, budaya, bahkan *value* (nilai-nilai).

"Indonesia diharapkan menjadi jembatan antara Timur dan Barat, antara dunia muslim moderat dan muslim tidak moderat, antara negara maju dan berkembang. Menurut saya itu bukan basa-basi diplomatis, namun *genuine expectation* dari banyak negara," lanjut Sudirman. Ia lalu menyampaikan bahwa lima belas tahun ke depan, Indonesia diprediksi menjadi kekuatan ekonomi terbesar ketujuh di dunia.

"Dunia melihat kita sebagai negara yang penting, menarik, dan memberi harapan besar. Pada sektor mikro – di bidang energi – adalah tugas kita semua untuk menjawab harapan mereka," lanjut Sudirman. Terkait listrik, Sudirman meyakini bahwa listrik adalah hulu dari seluruh pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan semuanya membutuhkan listrik.

"Karena itu, di pundak kita tantangannya besar. Kita harus

Menteri ESDM Sudirman Said mengharapkan acara ini dapat menjadi ajang untuk bermaafan sekaligus mempererat hubungan dengan stakeholder.

Saat halal bi halal di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (28/7), Sudirman Said juga menyampaikan pentingnya Indonesia untuk menjawab tantangan dunia.

mencanangkan tekad bersama bahwa ini bukan tantangan Indonesia saja, melainkan tantangan dunia juga. Ini adalah tantangan untuk melihat apakah kita mampu tumbuh sebesar itu."

Sudirman kemudian menjelaskan hasil rapat dengan Wapres Jusuf Kalla yang telah memutuskan dua hal: yang pertama, menjaga energi mix dengan komposisi batubara 50%, gas 20%, dan selebihnya merupakan porsi dari energi terbarukan. Yang kedua, pembangkit PLN akan dikonsolidasi lagi sehingga 5.000 MW untuk PLN, dan 30.000 MW untuk *Independent Power Producer* (IPP) yang mana memberikan peluang lebih besar pada swasta untuk berpartisipasi. Transmisi juga akan melibatkan swata. Sudirman mengatakan tujuannya adalah supaya masing-masing pihak bisa fokus. Ia mengatakan tugas pemerintah adalah melayani *stakeholder* dan melayani masyarakat, agar program besar ini bisa terlaksana.

"Mari kita kerja, mari kita kembali pada rutinitas," pungkas Sudirman. (AMH)

Pemberian Hadiah Lomba Foto HUT ke-70 RI di DJK

Bulan Agustus yang lalu DJK mengadakan lomba foto untuk merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-70 Republik Indonesia. Tema lomba ini adalah keceriaan pegawai DJK dalam menyambut HUT RI tersebut. Ada enam pemenang yang terdiri dari juara I, II, III, serta favorit I, II, III. Pemberian hadiah lomba berupa parcel dilakukan oleh Kepala Subbagian Informasi Hukum Chusniarti Putri Budi Sedjati pada Senin (31/8) bertempat di Perpustakaan DJK. (AMH)

Juara I: Subdirektorat Kerjasama Ketenagalistrikan

Juara II: Bagian Umum dan Kepegawaian

Juara III: Petugas Kebersihan DJK

Favorit I: Petugas Keamanan DJK

Favorit II: Bagian Keuangan

Favorit III: Subdirektorat Perlindungan Konsumen Listrik

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Membangun Kedaulatan Energi

Eksplorasi • Produksi • Diversifikasi • Konservasi

Matikan lampu ketika sudah tidak digunakan

Save MORE, Pay Less

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
Jalan HR Rasuna Said Blok X2, Kav.7-8, Kuningan
Jakarta Selatan 12950
Telp. (021) 5225180, Fax (021) 5256044
www.djk.esdm.go.id